



LAPORAN TAHUNAN **INFID 2023**

LAPORAN TAHUNAN INFID 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
PERJALANAN INFID SELAMA 2023	xii
INFID DALAM ANGKA	xvi
KEGIATAN INFID	xviii
TESTIMONI MITRA DAN ANGGOTA INFID	xxii
DEWAN PENGURUS & DEWAN PENGAWAS	xxvi
BAB 1 PROFIL 38 TAHUN PERJUANGAN INFID	1
BAB 2 PROGRAM INFID 2023	5
2.1 HAM	5
2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	9
2.3 Pengurangan Ketimpangan	12
BAB 3 INFID DALAM PERSPEKTIF MEDIA MASSA	19
BAB 4 INFID DI TENGAH MASYARAKAT	23
BAB 5 CATATAN KRITIS	27
DAFTAR KEGIATAN TAHUN 2023	30

KATA PENGANTAR

38 Tahun merupakan perjalanan panjang bagi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan 78 NGO dan 2 orang perwakilan individu untuk tetap secara konsisten memperjuangkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, mulai dari tingkat lokal, nasional hingga global. Selain itu, komitmen untuk turut berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) untuk kehidupan yang lebih adil bagi semua pun terus dilakukan melalui serangkaian program aksi guna memastikan bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak warga.

Tahun 2023 ini, peran INFID menjadi penting juga untuk turut mempersiapkan Indonesia menuju Tahun Politik 2024, mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkualitas (baca: Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah) di seluruh wilayah Indonesia, sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan rakyat, demokratis, jujur dan berintegritas.

Di sisi lain, INFID juga terus bekerja bersama anggota dan mitra-mitra pada isu-isu strategis dalam kerangka program, antara lain: mendorong pemajuan toleransi dan pencegahan ekstremisme, peningkatan kapasitas orang muda dan aktor agama, peningkatan kapasitas Non Government Organization (NGO)/ Civil Society Organization (CSO), peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat, Open Government Partnership (OGP), mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pembiayaan OMS, dan beberapa program lainnya.

Sekretariat bersama dengan anggota INFID hingga saat ini masih terus aktif melakukan kerja-kerja riset, advokasi dan pemberdayaan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, mendorong penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia. Banyak pihak turut berkontribusi dan mendukung, dan INFID mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung dan berkolaborasi, baik dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, antara lain: Seknas OGP, Sekretariat Bersama (Sekber) CSO OGP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), KOMNAS Perempuan, Kantor Staf Presiden (KSP). Lembaga donor, antara lain: U.S. Agency for International Development (USAID), Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (Australia DFAT), Kedutaan Belanda, United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), Ford Foundation dan OXFAM di Indonesia. Maupun mitra-mitra

strategis INFID lainnya dari OMS yang memiliki semangat dan komitmen yang sejalan dalam penegakan HAM dan Demokrasi.

Dewan Pengurus INFID berharap agar gerakan masyarakat sipil terus tumbuh, berkembang, dan terkonsolidasi, agar tetap berkontribusi kuat terhadap perubahan guna menciptakan Indonesia dan dunia yang adil dan sejahtera.

Ketua Dewan Pengurus INFID
Khairani

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asian Development Bank.
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations.
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ADN	: Asia Democracy Network.
A2SD	: Action for Sustainable Development.
AI	: Artificial Intelligence.
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
CSO	: Civil Society Organization.
C20	: Chair of Civil 20.
CEDAW	: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ECOSOC	: Economic and Social Council.
EKOSOB	: Ekonomi, Sosial dan Budaya.
GTN BHAM	: Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM
G20	: Group of Twenty.
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
Gen Z	: Generasi Zoomer yang lahir pada 1997 hingga 2012.
HAM	: Hak Asasi Manusia.
HRWG	: Human Rights Working Group.
INFID	: International NGO Forum on Indonesian Development.
IMF	: International Monetary Fund.
ICW	: Indonesian Corruption Watch.

IEU	: The Economist Intelligence Unit.
JANIC	: Japan NGO Center for International Cooperation.
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender.
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online.
KBB	: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
KOICA	: Korea International Cooperation Agency.
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPU	: Komisi Pemilihan Umum.
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat.
MK	: Mahkamah Konstitusi.
NGO	: Non Governmental Organization.
NED	: National Endowment for Democracy.
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil.
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah.
OGP	: Open Government Partnership.
Ormas	: Organisasi Masyarakat.
PVE	: Preventing Violent Extremism.
P/CVE	: Preventing-Countering Violent Extremism.
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Parpol	: Partai Politik.
Pokja	: Kelompok Kerja.
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja.
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
RI	: Republik Indonesia.
SDGs	: Sustainable Development Goals.
SDO	: Sekolah Demokrasi Online.
SDA	: Sumber Daya Alam.
SDH	: Sekolah Demokrasi Hybrid.
UU TPKS	: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UN	: United Nations.
UNDP	: United Nations Development Programme.
USAID	: United States Agency for International Development.
UU	: Undang-Undang.
WRI – LCDI	: World Resource Institute - Low Carbon Development Indonesia.
WFH	: Work From Home

PERJALANAN INFID SELAMA 2023

Tahun 2023 menjadi tahun penting bagi INFID sebagai organisasi yang beranggotakan 78 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki komitmen pada penegakan HAM dan Demokrasi. Sejumlah aktivitas telah dilakukan oleh INFID, baik bersifat internal kelembagaan maupun dalam kerja-kerja advokasi dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil.

Pertama, penataan kelembagaan telah dilakukan guna memastikan organisasi dapat bekerja sesuai dengan AD/ART dan mandat Sidang Umum Anggota (SUA) Tahun 2022. Diawali dengan penataan kebijakan, pengangkatan Bapak Iwan Misthohizzaman sebagai Direktur Eksekutif untuk periode 2023-2026 oleh Dewan Pengurus INFID hingga konsolidasi dan penguatan kapasitas anggota INFID berbasis hasil survei yang telah dilakukan terhadap anggota INFID. Serial diskusi dan pelatihan dilakukan untuk memastikan agar anggota INFID memiliki kapasitas yang kuat dari aspek substansi dan program maupun tata kelola kelembagaan.

Kedua, memasuki tahun politik, ada banyak respon gerakan masyarakat sipil, termasuk sekretariat dan anggota INFID yang melakukan serangkaian advokasi untuk mengawal proses Pemilihan Umum (PEMILU) yang berkualitas. INFID bersama dengan OMS lainnya juga terus mengkampanyekan pemilu bersih, penegakan HAM dan Demokrasi, serta pencapaian target SDG's sebagai komitmen negara.

Secara khusus, Laporan INFID 2023 ini merupakan pencapaian atas kinerja INFID sebagai organisasi masyarakat sipil dan bentuk komitmen INFID dalam mewujudkan tiga misi besar INFID, yaitu; 1) Mendorong pencapaian SDGs yang partisipatif dan inklusif; 2) Mendorong penurunan ketimpangan; 3) Mempromosikan HAM dan Demokrasi.

INFID sebagai organisasi masyarakat sipil terus mengawal dan memastikan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara demokratis, sesuai dengan nilai-nilai HAM. Tidak hanya itu, INFID juga bersuara atas kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi, selain kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Upaya INFID dalam mengawal demokrasi di Indonesia ini, mendorong INFID melakukan inovasi dengan mengimplementasikan kabupaten / kota HAM yang terwujud dalam berbagai sektor diantaranya; Sektor bisnis, pencegahan intoleransi dan ekstremisme, demi menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi masyarakat sipil, sehingga masyarakat sipil tetap kritis dalam merespon perkembangan politik elektoral.

Dalam laporan tahunan ini, INFID berharap pencapaian di tingkat kebijakan dan praktis, sekaligus beragam tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan oleh INFID dengan baik. Ditambah dengan adanya kolaborasi bersama para pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta maupun masyarakat. Selama 2023, INFID melakukan langkah yang strategis dalam menghadapi berbagai isu-isu:

1. Pada isu HAM dan Demokrasi, INFID terus bersikap kritis kepada pemerintah sembari memberikan rekomendasi berbasis bukti berdasarkan riset yang kredibel. INFID tetap menyikapi dengan kritis berbagai persoalan dari perspektif HAM dan Demokrasi yang terjadi di Indonesia seperti perampasan ruang hidup, termasuk konflik agraria, isu perburuan yang ditimbulkan oleh hukum ketenagakerjaan yang bermasalah (Omnibus Law), penggusuran dan perampasan lahan rakyat— akibat pembangunan proyek strategis dan investasi, juga intervensi aparat yang semakin represif dapat meningkatnya konflik dan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
2. INFID dalam posisi menguatkan dan mengawal demokrasi secara damai khususnya dalam rangka persiapan pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Polarisasi politik identitas menjelang 2024 (politisasi agama, suku, ras untuk kepentingan politik dan kekuasaan) masih menjadi alat utama untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Dalam hal ini INFID menghindari dan tidak masuk dalam posisi politik disintegrasi di wilayah lokal. INFID secara konsisten terlibat dalam menguatkan posisi HAM, termasuk tetap menyampaikan isu HAM dengan tegas dan diplomatis dan memastikan terjadinya dialog yang setara.
3. INFID akan terus memonitor situasi HAM, baik di tingkat nasional, regional ASEAN maupun internasional, INFID akan terus mengingatkan prinsip HAM sebagai dasar dari landasan kemanusiaan dan keadilan, bahkan prinsip HAM dalam bisnis yang seringkali menimbulkan kesenjangan sosial dan semakin tingginya kerusakan lingkungan hidup, dengan mengabaikan ekosistem, ekologi, biodiversity dan lainnya, akibat longgarnya transaksi bisnis dan investasi. INFID selalu mengambil peran dalam advokasi HAM di kancah internasional melalui rekomendasi UPR dan komite HAM, salah satu yang INFID lakukan yaitu, mengambil peran penting dalam sidang Jenewa pada November dan diadopsi pada July 2023. INFID mengambil langkah strategis untuk melakukan konsolidasi masyarakat sipil, bahkan terlibat aktif dan bersuara di Sidang Jenewa, membangun jalur khusus di Jenewa dan PBB; Human Rights Council; Peran INFID dalam memberikan rekomendasi RPJMN.

Pada 2023, deretan peristiwa terjadi di Indonesia dan merupakan tahun politik yang tidak mudah, mulai sengketa pemilu, politik uang, politik identitas

dan lainnya, INFID memilih mendorong partisipasi perempuan di kancah politik sebagai isu yang krusial, karena keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen sangat penting dalam menyeimbangkan posisi tawar perempuan yang berkeadilan gender. INFID mendukung peningkatan kapasitas mereka, menyiapkan kader perempuan dalam pelaksanaan pemilu. Meski isu krusial perempuan di ranah politik ini akan menghadapi tantangan yang tidak mudah dari berbagai stakeholders diantaranya; Pemerintah, penegak hukum, militer, korporasi hingga media arus utama. INFID memberikan dukungan terhadap kampanye digital yang mendukung politisi dengan kriteria pluralis dan anti kekerasan. Karena teknologi digital dapat menembus keterbatasan ruang dan waktu, sehingga para pemilih dapat menentukan calon pemimpin yang dianggap kredibel, serta dianggap mampu menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan memiliki skill dalam menjalankan good and clean government.

Sedangkan untuk Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), INFID berkontribusi aktif di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat global, kondisi negara-negara masih bekerja dalam mencapai SDGs, framework SDGs di tingkat regional ASEAN dan UN Global masih terfragmentasi, sedangkan di tingkat nasional, pemerintah Indonesia cenderung memilih tujuan SDGs yang sesuai dengan agenda prioritas yang ingin dicapai, baik di tingkat regional ASEAN dan internasional. INFID telah berkontribusi aktif dalam penyusunan Laporan Mekanisme HAM Internasional (CEDAW, UPR, Forum HLPF dan lainnya). Selain itu, INFID berpartisipasi dan terlibat aktif dalam sidang-sidang Laporan Implementasi Regional dan Internasional (CEDAW, UPR, Forum HLPF dan lainnya).

INFID sebagai balance and critical engagement, mengambil peran dalam knowledge management (fasilitator atau mediator). Peran Sekretariat sebagai penghubung antar anggota untuk sharing knowledge sangatlah penting. Pada tingkat nasional, INFID juga melakukan advokasi dan monitor (capaian 17 SDGs, kebijakan dan implementasi). Selain itu INFID terlibat aktif dalam jaringan pemantauan mekanisme HAM seperti HRWG, CWRI. Demi mendukung kerja-kerja advokasi itu, INFID menyusun database secara reguler tentang kasus dan pelanggaran HAM di Indonesia yang berkolaborasi dengan jaringan. Sedangkan di tingkat regional dan internasional, INFID juga melakukan advokasi, kolaborasi dengan anggota untuk amplifikasi isu SDGs, partnership (VNR 2023, forum HLPF dan ECOSOC).

INFID menjadi jembatan dan ruang dialog bagi perbedaan SDGs dan antar organisasi masyarakat sipil. INFID memainkan peran penting dalam capacity building SDGs, memberikan pemahaman SDGs di tingkat lokal, baik di level kabupaten/kota dan provinsi. INFID sebagai mitra kerja berbagai multi-stakeholder, baik pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, memilih untuk mendukung dengan pendekatan dan perspektif HAM. INFID menyadari ada ketimpangan pengetahuan SDGs di Jakarta dan daerah-daerah lain, namun posisi sebagai

mitra, INFID akan terus mendukung kerja-kerja organisasi masyarakat sipil agar tetap konsisten dan independen, baik secara visi / misi dan prinsip organisasi. INFID berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar dan nilai organisasi, dengan tidak menerima dana dari tiga lembaga donor internasional ini yaitu, IMF, World Bank dan ADB. INFID akan terus melakukan advokasi bersama untuk isu-isu SDGs termasuk partisipasi dalam penelitian dan menyelenggarakan beragam event. INFID berkomitmen terus mengawal implementasi ke arah kebijakan dan program untuk isu SDGs dan advokasi bersama anggota. Kolaborasi akan terus disinergikan dalam implementasi isu SDGs antara sekretariat dan anggota.

Selain bergerak dalam tiga isu besar, yaitu HAM dan Demokrasi, SDGs dan Penurunan Ketimpangan, INFID juga memfasilitasi komunikasi antar CSO di Indonesia dan luar negeri untuk mempromosikan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kaum marjinal di Indonesia. INFID bertindak sebagai forum yang mewadahi CSO di Indonesia. Hingga saat ini INFID telah beranggotakan 78 lembaga CSO dan dua individu. Bahkan INFID telah melakukan survei kelembagaan anggota INFID pada 2023, menurut data INFID berdasarkan riset yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebanyak 71 lembaga dari total 78 lembaga anggota INFID telah menjawab dan mengikuti survei yang bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek kelembagaan, adapun poin-poin pertanyaan dalam survei meliputi; Badan hukum, tahun pengesahan Kemenkumham, kepemilikan NPWP, penyusunan laporan tahunan kelembagaan, waktu terakhir penyusunan laporan tahunan lembaga, publikasi laporan tahunan lembaga pada media sosial, audit tahunan laporan keuangan, penyisipan hasil audit pada laporan tahunan lembaga, waktu terakhir audit lembaga, kendala dalam audit lembaga, kisaran biaya audit dan kerja sama dengan lembaga donor internasional (mitra pembangunan). Hanya tujuh lembaga anggota INFID yang tidak mengisi survei riset kelengkapan kelembagaan.

INFID DALAM ANGKA



38 tahun Usia INFID



11 Project



345 Publikasi



511 Liputan Media



14 Riset



34 Pelatihan



9 Kertas Kerja



Total Portofolio **26.1 Miliar Rupiah**

Media Sosial:



Facebook: Sebanyak 7.236 menyukai



Instagram: Followers 8.056



Twitter: Followers 4.355



YouTube: Subscribers 1.656



Website: Visitors 17.532



Mitra Pembangunan:

U.S. Agency for International Development (USAID), Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (Australia DFAT), Kedutaan Belanda, United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), Ford Foundation, OXFAM di Indonesia.



Struktur Organisasi:

3 Dewan Pengawas, 7 Dewan Pengurus, 5 Penasihat Ahli, dan 38 Staff.

KEGIATAN INFID 2023

16 Maret 2023

INFID menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan mitra pembangunan. Kegiatan INFID Development Partner Meeting (IDPM) ini mengambil tema “Kondisi dan Tantangan Demokrasi di Indonesia: Penegakan Hukum, Merawat Toleransi dan Keberagaman, serta Situasi Ekonomi Sosial Perempuan.” Diharapkan, CSO di Indonesia dalam situasi pemulihan pasca pandemi harus mampu beradaptasi dengan situasi persiapan pemilu serentak 2023. Perhelatan pemilu 2023, menjadi tahun yang penting dan bagi masyarakat sipil harus siap mengawal tahun politik 2024, yaitu pemilihan capres - cawapres, anggota DPR RI dan anggota DPRD.

2 Augst - 19 September 2023

INFID dan Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Jawa Timur, bekerja sama dengan Bakesbangpol Jawa Timur menyelesaikan rangkaian kegiatan “Sekolah Demokrasi Online (SDO). Kegiatan ini merupakan platform sekolah daring yang mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama bagi multi pihak seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, ormas keagamaan, kelompok rentan dan minoritas, dalam memperkuat demokrasi untuk mencegah ekstremisme dengan kekerasan di tingkat kabupaten/kota.

July - Augst 2023

INFID menyelenggarakan Survei Kelembagaan Anggota INFID Tahun 2023. Menurut data yang dikumpulkan, diketahui bahwasanya sebanyak 71 lembaga dari total 78 lembaga Anggota INFID telah menjawab dan mengikuti survei yang dilaksanakan oleh INFID dengan tujuan menganalisis beberapa aspek kelembagaan dari tiap-tiap lembaga Anggota INFID.

20 July - November 2023

INFID menggelar sekolah online “Pelatihan Penggalangan Dana melalui Penyusunan Proposal bagi Anggota INFID” untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil di bidang hak asasi manusia dan demokrasi, terdapat 16 anggota INFID yang terlibat sebagai peserta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam menyusun proposal. Kegiatan ini tidak saja sebagai kegiatan capacity building yang diberikan ke anggota INFID, namun meningkatkan kompetensi mereka. Berdasarkan survei yang dilakukan INFID pada 2022, sejumlah anggota banyak mengalami kesulitan atau berkurang akses pendanaan organisasinya, sekitar 73,9 persen. Bahkan banyak anggota berharap mendapatkan dukungan pendanaan dari Sekretariat INFID, terkait dengan peningkatan kapasitas organisasi dalam penyusunan proposal, sekitar 36,2 persen.

17-19 October 2023

INFID menggelar Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2023 untuk memberikan ruang bagi kalangan muda terlibat secara aktif, sehingga dapat memaknai proses-proses pembangunan, termasuk dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan. INFID memberikan kesempatan bagi kalangan muda untuk saling berdiskusi, menyampaikan aspirasi, gagasan, serta rekomendasi untuk seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Kegiatan ini merupakan dukungan dan komitmen INFID dalam penguatan HAM dan inklusivitas, termasuk di dalamnya adalah mendengar dan melibatkan orang muda dalam proses pembangunan.

21 November 2023

INFID bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Jawa Timur menyelenggarakan Kick Off Program Harmoni Tahun Ketiga secara luring. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih 30 lembaga yang bertujuan untuk membangun ruang diskusi bersama mengenai perkembangan penanganan dan pendampingan kepada individu atau kelompok orang yang terpapar dengan paham radikal terorisme, termasuk mantan napiter, deportan dan returni secara umum dan khususnya perempuan dan anak. Begitu juga memberikan pemahaman agar pemerintah daerah, masyarakat sipil, penegak hukum dan keluarga saling bersinergi untuk siap menghadapi persoalan dan melayani. Karena negara harus hadir dalam proses deradikalisasi dan memenuhi kebutuhan hak dasar individu atau kelompok orang yang terpapar radikalisme termasuk deportan dan returni.

13-14 December 2023

INFID selalu mendukung peningkatan kapasitas masyarakat sipil dengan menyelenggarakan “Sekolah Demokrasi Hybrid: Upaya Cegah Politisasi Identitas Pada Pemilu 2024 di Provinsi Banten.” Kegiatan Sekolah Demokrasi Hybrid (SDH) bekerjasama dengan P3M dan merupakan angkatan ke 5. Sekolah ini diperuntukkan bagi berbagai pemangku kebijakan di Provinsi Banten. Kegiatan ini terdapat 10 sesi dan diikuti oleh 33 peserta dari berbagai organisasi dan lembaga dalam hybrid yaitu daring dan luring.

TESTIMONI MITRA DAN ANGGOTA INFID



Krissusandi Gunui

Institut Dayakologi, Pontianak, Kalimantan Barat

Institut Dayakologi berkolaborasi dengan INFID pada kegiatan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM dan Festival HAM di Singkawang, Kalimantan Barat. Kami bersyukur karena INFID memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan partisipasi anggota, peningkatan kapasitas dan membangun komunikasi intensif dengan anggota, sehingga seluruh kegiatan berjalan sesuai harapan.

INFID juga mulai merencanakan melibatkan Dayakologi untuk penyusunan proposal bersama, khususnya terkait pendidikan multikultural di Kalimantan Barat, dan kami berharap dapat segera dilaksanakan mengingat isu tersebut cukup penting di wilayah kerja kami. Kolaborasi atau kerja sama INFID dengan anggota harus lebih maksimal lagi agar organisasi masyarakat sipil di daerah khususnya, lebih kuat dari aspek substansi dan pendanaan, sehingga dapat berbuat banyak untuk perubahan

Dukungan INFID untuk gerakan masyarakat sipil di Kalimantan Barat sangat penting untuk membangun perdamaian, terlebih Kalimantan Barat tahun ini menjadi bagian penting dari pembangunan IKN. Kami berharap, pertemuan tahunan INFID dengan anggota dapat diaktifkan sehingga terbangun konsolidasi dan penguatan gagasan dari berbagai wilayah kerja anggota INFID.



Rahmi Meriyanti

WCC Nurani Perempuan, Padang, Sumatera Barat.

Pada 2023, Nurani Perempuan memiliki pengalaman terlibat dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat INFID tentang penulisan proposal dalam program peningkatan kapasitas. Pelatihan ini sangat kami butuhkan karena sulitnya bagi kami untuk mendapatkan akses pendanaan yang salah satunya bisa disebabkan karena kualitas proposal yang kami susun. Melalui

pelatihan INFID yang didukung oleh KOICA, kami mendapatkan manfaat dan pelatihannya sangat menarik, hanya saja karena penyelenggaraannya dilakukan secara online, tantangannya adalah jaringan koneksi internet yang kurang baik, waktu yang terbatas serta terbatasnya kesempatan untuk diskusi lebih mendalam terkait materi, sehingga banyak materi yang bagus dan menarik sesuai dengan kebutuhan kami, dengan narasumber yang kompeten, tapi tidak komprehensif dapat kami terima karena kendala teknis.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh INFID tersebut membantu kami dalam proses penyusunan proposal, sehingga ketika ada call for proposal yang dishare melalui mailing list atau milis oleh sekretariat INFID, dan kami mencoba mempraktikkan, kami berhasil lolos dan mendapat dukungan funding internasional.

Sekretariat INFID telah memfasilitasi Nurani Perempuan sesuai dengan kebutuhan kami untuk peningkatan kapasitas bagi kami NGO daerah yang mengalami kesulitan mengakses pendanaan lembaga donor. Hanya saja, kami juga dihadapkan pada tantangan audit keuangan yang cukup memberatkan karena biayanya yang mahal. Ke depan, harapannya persoalan audit keuangan yang banyak dikeluhkan NGO termasuk anggota INFID, dapat dibantu untuk diselesaikan.



Tongam Panggabean

BAKUMSU, Medan, Sumatera Utara

BAKUMSU mengapresiasi inisiatif INFID dalam mengembangkan kemampuan anggotanya terkait strategi fundraising. Pelatihan yang pernah diikuti oleh dua staf BAKUMSU telah turut membantu peningkatan insight kami tentang landscape, pola dan strategi fundraising lewat skema kemitraan proyek yang berbasis tujuan namun kompetitif. Inisiatif semacam ini perlu dilanjutkan dengan pelatihan yang lebih intensif dan on site. Bentuk dan motif eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan atas nama pembangunan (e.g., PSN, pertambangan, perkebunan dsb) semakin kompleks yang menambah tekanan terhadap masyarakat lokal, masyarakat adat, petani dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Oleh sebab itu, INFID perlu menemukan formula baru yang lebih efektif dalam mendukung berbagai advokasi di isu SDA yang dilakukan oleh anggota, mitra dan jaringan nya di tingkat lokal dan

nasional. Constructive dan critical engagement perlu diperankan atau diintegrasikan secara efektif dan konsisten dalam seluruh program INFID, salah satunya dengan memastikan keterlibatan kelompok-kelompok berkasus sebagai aktor utama dalam setiap upaya advokasi yang dijalankan, termasuk membangun sensitivitas terhadap perjuangan kelompok rentan tersebut. Berkaca dari Festival HAM yang rutin diadakan oleh INFID dan mitranya, saya belum melihat bahwa INFID telah mewujudkan keterlibatan konstruktif dan kritis yang efektif, termasuk sensitivitas terhadap kelompok berkasus. Akibatnya, kegiatan yang seharusnya strategis tersebut justru terjebak pada upaya-upaya teknokratis yang resolusinya tidak menyentuh akar persoalan, apalagi berkontribusi terhadap kelompok-kelompok berkasus. Saya juga melihat bahwa INFID belum memainkan peran yang efektif dalam mengakses mekanisme HAM Internasional terutama dalam mekanisme EKOSOB, dimana INFID sesungguhnya memiliki mandat.

Mandat ini perlu diperkuat, salah satunya dengan membangun sistem pemantauan pemenuhan atau pelanggaran hak-hak EKOSOB yang terpadu dengan melibatkan anggota dan mitra atau jaringan yg bekerja di level basis. Dengan demikian, produk pengetahuan dan laporan-laporan yang disampaikan oleh INFID dalam rangka mengakses mekanisme-mekanisme PBB tersebut memiliki legitimasi yang lebih kuat. Pada 16 Maret 2023, INFID juga memfasilitasi BAKUMSU dengan mengadakan donor meeting. Namun kami belum mengajukan proposal sejak pertemuan itu. Menurut saya, isu BAKUMSU kurang relevan dengan fokus lembaga donor yang hadir dalam pertemuan itu, seingat saya ada 10 perwakilan dari pihak lembaga donor.



Joko Purnomo

IDFOS Indonesia, Bojonegoro, Jawa Timur.

IDFOS mengenal INFID awalnya saat berkolaborasi dengan INFID tentang Open Government Partnership terkait isu keterbukaan pengelolaan pemerintah lokal dan pengambilan kebijakan. Selain itu, Bojonegoro juga pernah jadi tuan rumah Festival HAM dan yang terbaru mengawal penyusunan rencana aksi SDGs.

Kami berharap INFID mengembangkan program-program yang selaras dengan lokal, termasuk isu Pengelolaan Sumber Daya Alam

(PSDA), termasuk isu kehutanan yang cukup kuat di Bojonegoro dan Tuban. Advokasi isu PSDA perlu dilakukan di tingkat nasional karena kebijakan tersebut ada di Kementerian, sehingga dukungan INFID sangat dibutuhkan. Ke depan, perlu penguatan konsolidasi anggota INFID, misalnya dengan mengoptimalkan whatsapp group untuk membangun diskursus penguatan isu HAM dan Demokrasi hingga tingkat lokal.



Mulyadi Prajitno

YPKM, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kolaborasi dengan INFID adalah kolaborasi yang saling mendukung, saling menguatkan, baik dari sisi program sumber daya dan isu yang menjadi konsen dari YKPM. Sebagai anggota INFID, kami (YKPM) merasakan manfaat keanggotaan. Misalnya dukungan dan asistensi kegiatan terutama isu SDGs yang belum dipahami di pemerintah dan masyarakat, termasuk NGO. Dukungan yang diberikan oleh INFID adalah dukungan program dan pendanaan meski kecil, namun cukup mendukung kinerja lapangan yang mengawal isu kemiskinan, SDGs dan asistensi program strategis

DEWAN PENGURUS, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT

DEWAN PENGURUS



Khairani
Ketua



Muhamad Isnur
Wakil Ketua



Dina Mariana
Sekretaris



Listyowati
Bendahara



Sarah Lery Mboeik
Anggota



Moh. Masykurudin Hafid
Anggota



Alita Karen
Anggota

DEWAN PENGAWAS



Dwi Rubiyanti Khalifah
Ketua



Wahyu Susilo
Anggota

PENASEHAT AHLI



Zumrotin K. Susilo



Muhammad AS Hikam



Mickael Bobby Hoelman



Bagus Takwin



Aris Arif Mundayat



Sugeng Bahagijo



Henrek Lokra
Anggota

SEKRETARIAT



Misthohizzaman
Executive Director



Jim Matuli
Director of Finance & HRD



Abdul Waidl
Senior Program Officer Human Rights & Democracy



Sanita Rini
Program Human Rights & Democracy, Preventing Violent-Extremism



Gesia Nurlita
Program Support Conference SDGs & General Assembly Meeting 2022



Rizka Antika
Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity



Alyaa Nabilah Zuhro
Program Officer Human Rights & Democracy



Hendrikus Rizky Visanto Putro
Program Assistant Human Rights & Democracy



Syafira Khairani

Program Assistant for Building Resilience Against Violent Extremism



Andi Nurkhafifah

Program Support Festival HAM 2023'



Rahmatul Amalia Nur Ahsani

Event Liaison Human Rights Due Diligence (HRDD)



Bona Tua P.P

Senior Program Officer SDGs



Angelika Fortuna Dewi Rusdy

Program Officer SDGs



Desri Astuti

Program Officer SDGs



Grace Joanessa Kuncoro Putri

Program Assistant SDGs



Ari Wibowo

Associate Researcher Program SDG



Rinto Leonardo Siahaan

Program Assistant SDGs



A.D Eridani

Senior Program Officer Inequality, Partnership Membership



Laurensius Susilo Yuniar

Program Support Inequality Partnership & Membership



Jeckson Robinson

Program Assistant



Florence

Admin & HR Manager



Sabarno

Operation Officer



Wasiton

Assistant Operation Officer



Ima Desiyanthi

Finance & Accounting Manager



Misnawati

Finance Manager, Tax Specialist



Fadil Kuntjara

Finance Officer



Rini Widyastuti
Finance Officer



Intan Bedisa
Communication & Digital Officer



Dwindi Nur Oceani
Creative Communication Officer



Naztia Haryanti
Konsultan Reels Creator



Victor Rumere
Field Coordinator - Kolaborasi



Intan Kusumaning Tiyas
Field Officer Kolaborasi



Lolita Limariana
Field Finance & Administration Kolaborasi



Veronica Purwaningsih
Field Coordinator Kolaborasi Kolaborasi



Fransiska Deasy Angelina Namsa
Administration Officer, Kolaborasi



Purnama Adil Marata
Senior Associate MEL Development Program



Suwarno
IT & Procurement Manager



Achmad Mubarok
Procurement Officer



BAB 1

PROFIL 38 TAHUN PERJUANGAN INFID

Pada 2023 ini, INFID telah memasuki usia ke 38 tahun, perjuangan yang panjang bagi INFID dengan agenda rutin yang padat. Sebagai organisasi masyarakat sipil, INFID telah berjuang untuk pembangunan Indonesia sejak 1985. Dalam advokasi kebijakan, INFID telah terakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan UN Special Consultative Status with the Economic and Social Council (ECOSOC), menyandang status ini sejak 2004 dan INFID telah terlibat dalam berbagai konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh PBB.

INFID telah berpartisipasi aktif dalam forum-forum Internasional, salah satunya anggota aktif di FORUS sejak 2009, sebuah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia yang berbasis di Paris, Prancis. Selain INFID menjadi bagian dari Beyond 2015, TAP Network dan SDSN, yaitu inisiatif-inisiatif global yang bertujuan mendorong pelaksanaan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2022.

Bahkan dalam kiprahnya yang lebih luas, INFID menjadi Chair of Civil 20 (C20) dalam periode bersejarah kepemimpinan G20 Indonesia yang terselenggara di Bali. INFID telah berhasil menjadi koordinator ratusan Civil Society Organization dari seluruh dunia untuk mendesak pemimpin negara G20 guna menciptakan solusi atas tujuh tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemanusiaan; Akses vaksin dan kesehatan global, kesetaraan gender dan disabilitas, perpajakan dan keuangan berkelanjutan, lingkungan, keadilan iklim dan transisi energi, edukasi, digitalisasi dan civil space; antikorupsi.

INFID juga mendapat kepercayaan menjadi salah

satu wakil dari unsur non pemerintah dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GT BHAM) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM. INFID berperan untuk mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan dalam bisnis dan HAM di tingkat nasional.

Lalu terpilihnya INFID menjadi Envoy dan Steering Committee dalam Open Government Partnership (OGP Global) membawa INFID berperan lebih luas dalam mengawal pembangunan di daerah-daerah di Indonesia dengan memberikan masukan-masukan yang strategis, serta INFID dapat berbagi pengalaman dengan sesama komite dari berbagai negara. INFID juga mewakili OGP dalam berbagai forum tingkat tinggi untuk berbagi pengalaman praktik baik dalam membangun agenda pemerintahan yang lebih demokratis.

Dalam mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian, serta menjamin terpenuhinya HAM di tingkat nasional dan global, INFID telah membangun prinsip kerja yang inklusif, toleransi dan kolaborasi. INFID bekerja berlandaskan keberagaman, tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, kewarganegaraan dan kemampuan fisik. Namun lebih fokus pada kompetensi dan semangat dalam advokasi, serta berkolaborasi. Program yang menjadi tumpuan INFID diantaranya: HAM dan Demokrasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Penurunan Ketimpangan.

Dalam program-program ini, INFID telah merekomendasikan beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut :

1. INFID akan berperan aktif dalam memfasilitasi kepentingan anggota.
2. INFID akan menjadi leaders pada program-program yang sudah dilaksanakan oleh sekretariat.
3. Mengoptimalkan posisi ECOSOC untuk advokasi Internasional termasuk melibatkan anggota.
4. INFID akan membuat beberapa gugus tugas, terkait isu-isu yang krusial seperti HAM, HAP, Demokrasi dan Pluralisme dengan perspektif keadilan sosial, kesetaraan gender dan inklusif di wilayah anggota yang diangkat ke nasional.
5. INFID terus berkomitmen dan aktif dalam kerangka advokasi pada pemilu 2024.
6. INFID akan terus mendukung sebagai pusat knowledge management, dengan sharing knowledge antara anggota, praktik baik, sharing resource, hasil penelitian dan pendanaan.
7. INFID berkomitmen untuk melakukan advokasi ke anggota terkait isu-isu; Perempuan dan anak, human trafficking, pangan, demokrasi ekonomi untuk private sector demi melindungi UMKM dari dampak negatif digital, bisnis dan

HAM, generasi milenial dan generasi Z, lingkungan dan climate change, SDGs goal 12 responsible consumption and production dengan skala Internasional yang terdiri dari eco green, carbon dan pengendalian polusi plastik, pelayanan publik berupa kesehatan dan pendidikan dalam kerangka SDGs, pelanggaran HAM masa lalu, keberagaman dan konflik terkait pemulihan hak korban.

Dalam ranah politik, INFID juga merekomendasikan beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut:

1. INFID merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR agar menyegarkan pembahasan dan pengesahan RUU yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, diantaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Data Pribadi, serta RUU Masyarakat Adat dengan proses yang partisipasi.
2. INFID merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR agar tidak gegabah dalam membahas dan mengesahkan RKUHP yang akan berujung pada penolakan dari masyarakat dan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
3. INFID menyikapi kebijakan pemerintah tentang Proyek Strategis Nasional yang berdampak negatif terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.
4. INFID merekomendasikan kepada Pemerintah, DPR, Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang damai dan berintegritas, serta mencegah penggunaan politik identitas,
5. INFID mendorong pemerintah untuk menjamin ruang kebebasan sipil.
6. INFID berkomitmen terus mengawal dan mendorong Pemerintah untuk melaksanakan SDGs secara efektif dan inklusif, termasuk mengintegrasikan dalam RPJMN dan berbagai kebijakan.
7. INFID akan mendorong dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan gender dalam semua program dan kebijakan, termasuk memastikan pelaksanaan UU TPPKS dan aturan turunannya.
8. INFID mendorong pemerintah dalam menerapkan inklusi sosial dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok rentan.

Meski dalam praktiknya selama kontestasi Pemilu 2023 berlangsung, serta menyisakan beragam persoalan seperti kecurangan pemilu dan lainnya, INFID tetap dalam posisi yang independen dan kritis terhadap kebijakan pemerintah, agar proses demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), sebab semua sengketa persoalan dalam Pemilu 2023 harus dapat diselesaikan sesuai dengan koridor hukum untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh elemen negara ini.



BAB 2

PROGRAM INFID 2023

2.1 Program HAM dan Demokrasi

Dalam Program HAM dan Demokrasi ini, INFID berkomitmen mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis yang memenuhi prinsip-prinsip HAM. Setelah 20 tahun pasca reformasi 1998, Indonesia merupakan negara yang paling demokratis di Asia Tenggara, terbukti lima kali pemilu berjalan secara damai dan bebas. Kebebasan pers juga menjadi mahkota, bahkan menjadi pilar demokrasi yang penting, selain kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Sedangkan tetangga-tetangga di Asia Tenggara masih mengalami pasang surut dalam demokrasi, seperti kudeta di Thailand dan Myanmar, sedangkan Indonesia dalam posisi terus berkembang dan memperkuat demokrasi.

Namun pada 2023, Detik.com menuliskan skor indeks demokrasi global Indonesia mengalami stagnasi dan posisi Indonesia berada di bawah Kolombia dan Filipina. Berdasarkan laporan indeks demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Februari 2023, dengan berdasarkan skor indeks yang memiliki skala nilai dari 0 hingga 10, serta pengukurannya didasarkan pada peringkat 60 indikator dan semuanya dikelompokkan dalam lima kategori diantaranya; proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik. Negara yang mencatatkan peningkatan skor indeks sebanyak 75 negara, sedangkan skor indeks untuk 92 negara lainnya mengalami stagnasi yaitu 48 atau menurun 44 pada 2022. Posisi Indonesia termasuk di dalam 48 negara ini. Pada 2023, Indonesia berada di peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor indeks demokrasi global Indonesia mengalami

penurunan dari 52 menjadi 54. Di ASEAN, posisi Indonesia pun di bawah Filipina yang peringkatnya 52 dengan skor indeks 6,73 dan Malaysia yang peringkatnya 40 dengan skor indeks 7,30. Di tingkat nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 dengan skor 79,51, turun 0,90 poin dari 2022 yang mencapai 80,41, yang banyak dipengaruhi oleh meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat dan berkeyakinan serta kemerdekaan pers (Siaran Pers Kemenko Pulhukam, 11/6/2024).

Menurunnya skor indeks demokrasi di Indonesia memunculkan banyak implikasi yang menggerus demokrasi itu sendiri dengan melahirkan “Achilles Helen” yaitu tumbuh suburnya kelompok-kelompok fundamentalis yang tidak toleran terhadap perbedaan. Kelompok-kelompok berhaluan radikal yang mengarah ke tindak terorisme berbasis kekerasan, mulai melibatkan perempuan dan anak sebagai pelaku sekaligus korban. Sebab itulah INFID terus mendorong sinergi dan kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil lainnya dalam peningkatan kapasitas dan advokasi terhadap deportasi dan return. Konsolidasi isu-isu krusial demokrasi dan HAM antar organisasi masyarakat sipil di Indonesia, terus didorong oleh INFID. Termasuk setelah tahun politik usai, namun justru menyisakan gejolak politik di dalam dan luar negeri dengan adanya kecurangan dalam pemilu capres dan cawapres 2023. Hal ini membuat INFID menginisiasi konsolidasi antar organisasi masyarakat sipil untuk saling berdialog mengenai isu-isu demokrasi dan HAM, baik di tingkat nasional dan internasional.

Isu-isu penting yang menjadi diskursus INFID, diantaranya adalah regresi demokrasi, populisme hingga pemilu. Sedangkan di level CSO, para mitra saling mendiskusikan isu-isu yang sedang dikerjakan oleh lembaganya dan berbagai tantangan dan kendala di lapangan. INFID menjadi ruang dialog bagi organisasi masyarakat sipil dalam memajukan demokrasi dan HAM di Indonesia, termasuk bagaimana menyusun langkah-langkah yang strategis dan menindaklanjuti advokasi-advokasi dan pengarusutamaan kebijakan berperspektif HAM. Kondisi demokrasi dan HAM di Indonesia memang mengalami pasang-surut dengan munculnya isu-isu perampasan ruang hidup, polarisasi politik identitas menjelang 2024, politik transaksional, demokrasi yang berjalan stagnan, meningkatnya kerentanan hingga peningkatan peran di kancah internasional dan nasional. Upaya untuk mendukung penguatan HAM dan Demokrasi di Indonesia, dilakukan oleh INFID melalui serangkaian program, yaitu:

1. INKLUSI

Program INKLUSI merupakan konsorsium yang dikelola oleh INFID bersama 7 anggota, yaitu: Maarif Institute, Perkumpulan Media Link, PW Fatayat NU Jawa Barat, PW Fatayat NU Jawa Timur, SETARA Institute, UNIKA Soegijapranata, dan Yayasan Inklusif. Program ini bertujuan untuk menjawab tantangan kepemimpinan dan inklusivitas di sektor-sektor kunci strategis seperti media

massa, BUMN, pemerintah lokal, pendidikan, kepemimpinan perempuan, dan media sosial. Fokus utamanya adalah mendorong partisipasi bermakna dari berbagai lapisan masyarakat dalam membangun kebebasan beragama/berkeyakinan dan resiliensi sosial terhadap isu-isu intoleransi, diskriminasi, dan ekstremisme berbasis kekerasan. INKLUSI didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dengan durasi program selama 3 tahun dan telah dimulai sejak akhir tahun 2022. Saat ini, INKLUSI sedang melanjutkan sisa masa proyek di tahun ketiga yang rencananya seluruh aktivitas akan diselesaikan pada bulan Maret 2025. Sebagai sebuah konsorsium besar, INKLUSI sudah menghasilkan sejumlah capaian jangka pendek, jangka menengah, maupun potensi jangka panjang.

2. Promoting Tolerance, Democracy and Human Rights to Prevent Violent Extremism (PREVENT)

PREVENT merupakan program yang didanai oleh National Endowment for Democracy (NED) sejak 2017. Program ini bertujuan untuk memperluas peran aktif para guru, orang muda, perempuan, media, dan pemerintah daerah untuk mempromosikan toleransi, keberagaman, dan kebebasan beragama. Selain itu, juga memperkuat pembelajaran dan kerja sama di dalam Indonesia dan antara organisasi-organisasi Indonesia dengan negara-negara lain dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti pluralisme dan toleransi. Terdapat 4 aktivitas utama dalam program ini, yaitu: 1) Memperluas Komitmen Pemerintah Daerah terhadap HAM dan Toleransi, Festival HAM; 2) Menumbuhkan Pemimpin Demokrasi di Kalangan Orang Muda, Youth Fellowship; 3) Kampanye Media Online; dan 4) Pembelajaran dan Kerja Sama Internasional: Memperkuat perspektif dan peran ulama perempuan dalam pemajuan kesetaraan gender dan inklusi sosial berdasarkan argumen agama.

Selama pelaksanaan program ini di Indonesia, telah berhasil mencapai 11 inisiatif dan kolaborasi regional dan internasional, 15 even nasional, 26 pelatihan, 15 penelitian, 15 panduan modul, 6 publikasi buku, 23,7 juta jangkauan kampanye media online dengan 39 mitra kerja di Indonesia. Capaian program PREVENT dipengaruhi oleh pelibatan mitra dari lokal, nasional, regional, dan internasional.

3. Bisnis dan HAM

Sejak 2016, INFID bersama beberapa CSO telah secara intensif mengadvokasi implementasi United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights (UNGPs on BHR) di Indonesia dan Keputusan Presiden tentang Bisnis & Hak Asasi Manusia. Fokus INFID adalah pada penegakan HAM di sektor bisnis, terutama pada pemenuhan hak-hak perempuan dan kesehatan lingkungan. Sepanjang 2021-2023, INFID secara rutin menyelenggarakan serangkaian

webinar dan diskusi koalisi CSO tentang bisnis & hak asasi manusia. INFID juga telah menerbitkan hasil penelitian, kebijakan singkat, artikel, podcast dan kampanye media sosial terkait bisnis & hak asasi manusia sepanjang 2016-2023 melalui dukungan OXFAM Indonesia. Terakhir melalui dukungan OXFAM pada tahun 2023 menjalankan proyek ASEAN 2023 INFLUENCING PLAN bertujuan “Strengthening Civic Space for Inclusive ASEAN 2023” dan proyek Fair for All dengan kegiatan yang bertujuan “Strengthened civil society has created space and a policy environment for alternative business model and value chains (palm oil and seafood) that are inclusive and sustainable, that benefit women smallholder farmers, young female entrepreneurs, companies and government”.

INFID saat ini menjadi anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM bersama dengan beberapa CSO (Elsam, Djokosoetono Research Center, FHIRRT, dan Setara Institute) sehingga perlu terus merawat modal sosial dan substansi dalam isu BHR di Indonesia. Ke depan, INFID perlu menyusun strategi advokasi dan keberlanjutan program guna mendukung advokasi BHR, karena INFID dianggap sebagai HUB strategis bagi jejaring CSO untuk kerja BHR baik yang di nasional dan daerah.

4. Festival HAM dan Pelatihan Kota HAM

INFID bergerak di isu Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) melalui setidaknya dua kegiatan, yakni Pelatihan Kabupaten/Kota HAM dan Festival HAM. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM selama tahun 2023 dilaksanakan 2 kali secara luring dan daring, dengan peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bagian Hukum dan Bappeda, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari tiap daerah.

Pelatihan secara luring dilaksanakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat diikuti oleh 28 peserta (OPD 9 perempuan dan 4 laki-laki, OMS 8 perempuan dan 7 laki-laki). Sedangkan pelatihan secara daring dilaksanakan melalui platform Zoom diikuti oleh 46 peserta (OPD 7 perempuan dan 4 laki-laki, OMS 22 perempuan dan 13 laki-laki). Pada pelatihan daring tersebut, INFID juga melibatkan penyandang disabilitas sebanyak 35 persen untuk berpartisipasi dan terlibat aktif. Kolaborasi menjadi kunci dalam pelatihan ini, sehingga bisa saling sharing knowledge (bertukar gagasan) dan berdialog satu pihak dengan yang lain.

Festival HAM merupakan agenda tahunan yang selalu INFID adakan dalam rangka upaya mempromosikan konsep Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Festival HAM merupakan ruang temu berbagai pemangku kepentingan yang berfokus pada pemenuhan HAM mulai dari tingkat daerah. Festival HAM 2023 diadakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat secara hybrid. Festival HAM

diikuti oleh berbagai kalangan mencakup Kementerian, Lembaga Negara, Komisi Negara, TNI/Polri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, dan Media Massa, serta masyarakat umum. Total peserta yang hadir dalam Festival HAM 2023 berjumlah 572 orang, luring dan daring, terdiri 185 perempuan, 384 laki-laki, dan 3 orang tidak menjawab. Festival HAM 2023 terdiri dari beberapa sesi, yakni welcoming gala dinner, opening ceremony, konferensi pers, 4 sesi Pleno, dan 9 sesi paralel).

Selain itu, INFID juga telah menyelesaikan penelitian terkait ‘Extremism and Policies on Extremism Preventing’. Online Democracy School (SDO), peningkatan kapasitas dan advokasi tentang “Religious Moderation at the Schools Level”, Youth Fellowship, training fasilitator tentang “Tolerant Youth”, Youth camp “Tolerant Youth”, training penulisan naratif bertema “Peaceful”, Online Media Campaigns, selain Islamic Training and the Fulfillment of Women’s Educational Rights.

2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

INFID meyakini bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan membantu memperkuat proses dan hasil pembangunan di Indonesia. Bahkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dianggap krusial, misalkan pajak yang tidak terkendali. Selama kurun waktu tiga tahun, INFID telah berfokus untuk menjadikan SDGs sebagai solusi dalam pembangunan. Advokasi INFID dalam pembangunan telah sukses mendorong terbitnya Keputusan Menteri PPN / Bappenas No.64 / 2018 tentang Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar Pembangunan Berkelanjutan sebagai bentuk upaya serius pemerintah untuk membuat peta jalan perwujudan SDGs di Indonesia.

Setidaknya terdapat tiga upaya INFID dalam memperkuat Program SDGs, yaitu: Pertama, INFID berkomitmen akan terus mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberikan peluang bagi semua pihak untuk terlibat dalam implementasi SDGs. Bahkan sejak 2017, INFID telah mendorong tujuh daerah yaitu; Bojonegoro, Pangkajene, Kepulauan Pangkep (Malang), Kubu Raya (Banda Aceh, Jember, Cirebon, Maros, Kupang dan DI. Yogyakarta untuk mengadopsi SDGs— di sertai tata kelola yang inklusif dan partisipasi. Kabupaten Pangkep misalnya, telah mengeluarkan Keputusan Bupati untuk implementasi SDGs yang melibatkan masyarakat sipil.

Kedua, INFID akan terus mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat sipil dalam implementasi dan pencapaian SDGs di berbagai daerah. Ketiga, INFID melibatkan dunia pendidikan terutama universitas agar berpartisipasi aktif dalam implementasi dan pencapaian SDGs. Padatnya agenda INFID selama 2023, juga memberi manfaat bagi organisasi masyarakat sipil dan masyarakat sipil itu sendiri.

Dalam kurun waktu satu tahun, INFID telah melibatkan 894 perempuan dan 806 laki-laki. Penguatan kapasitas SDM di Indonesia telah dilakukan INFID secara adil dalam komposisi gender, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud.

Pada 2023, program SDGs ini juga didukung oleh sejumlah program yang dikelola oleh sekretariat INFID bersama dengan anggota dan mitra OMS lainnya, yaitu:

1. KOLABORASI

Program ini merupakan program peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang kemudian dilanjutkan ke daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Program yang didukung oleh USAID dari October 2022 hingga September 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (DOK) yang tepat sasaran sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Program ini dilaksanakan dalam bentuk konsorsium, yang dipimpin oleh WVI (lead), dengan anggota konsorsium INFID dan Kitong Bisa Foundation (KBF), yang bermitra dengan Kementerian PPN / Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemprov Papua, dan Pemprov Papua Barat. Pada perjalanannya, daerah otonomi baru (DOB) seperti Papua Selatan dan Papua Barat Daya juga menjadi mitra strategi dan penerima manfaat dari program KOLABORASI.

Beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung program ini, antara lain: assessment terkait kebutuhan Peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, Establishment of Multi Stakeholder Forum (MSF) Kesehatan di Papua, dan MSF Pendidikan di Papua Barat, establishment of SDGs Center di Universitas Papua (Papua Barat), penyusunan RAD SDGs Papua Barat dan Papua Barat Daya, studi sektor unggulan provinsi Papua Barat Daya dan rangkaian advokasi kebijakan lainnya. Capaian program ini, selain meningkatnya kapasitas lokal serta pertemuan antara aspirasi warga (demand side) dan program pemerintah (supply side), juga menguatnya kolaborasi antara pemerintah pusat (MOFA, MOHA dan Bappenas) dengan Pemerintah Daerah.

2. BUILD

Program “Our Building Institutions and Networks (BUILD)” bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan ketahanan keuangan INFID sehingga dapat berkontribusi kuat mendukung kerja-kerja gerakan masyarakat sipil dan stakeholders lainnya dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Program ini selain bermitra dengan CSO di tingkat nasional dan daerah, juga bekerjasama dengan Bappenas, SDG Sekretariat nasional dan Pemda.

Program dengan durasi 5 tahun sejak 2021 dan berakhir 2026 ini mendapat dukungan pendanaan dari Ford Foundation, dengan aktivitas utama berupa dukungan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, baik untuk sekretariat INFID maupun anggota dan mitra kerja.

3. INKLUSI

Program ini bertema "Mengembangkan Lingkungan yang Kondusif bagi Pembiayaan OMS: Advokasi Peraturan Presiden Tentang Dana Abadi OMS" yang didukung oleh DFAT, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan pendukung yang kondusif bagi organisasi masyarakat sipil melalui dukungan anggaran publik. Proyek ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas OMS agar dapat berpartisipasi dalam kelayakan dana abadi OMS.

OMS merupakan aktor strategis dalam pembangunan karena perannya selama ini berkontribusi kuat menciptakan perubahan pada berbagai sektor, mulai dari politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan isu-isu pelayanan dasar masyarakat. Namun di sisi lain, OMS juga dihadapkan pada tantangan pendanaan yang sangat berpengaruh terhadap kerja-kerja OMS. Karena itu, penting bagi negara untuk memperhatikan keberlanjutan kerja-kerja OMS dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan di Indonesia melalui Dana Abadi OMS.

Program ini membentuk Pokja Dana Abadi OMS, yang terdiri dari: INFID, Prakarsa, Penabulu, TI Indonesia, IKA, Remdec, Kapal Perempuan, dan Konsil LSM. Adapun aktivitas utamanya adalah riset, advokasi kebijakan, kampanye publik dan peningkatan kapasitas CSO. Program ini bermitra dengan Bappenas, Kemdagri, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Setneg dan KSP.

Hingga akhir program, pembahasan dana abadi OMS telah melibatkan 10 Kementerian dan Lembaga, dengan capaian penting adanya pengakuan eksplisit dana abadi OMS dalam dokumen rancangan akhir RPJPN 2025-2045, visi dan misi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, hingga narasi dana abadi OMS direkognisi pemerintah dalam bentuk rakor antar K/L setara eselon 1 di Kementerian Kemenko Polhukam.

4. Open Government Partnership (OGP)

Program ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan komitmen OGP global di tingkat nasional oleh pemerintah dan stakeholder. Dalam hal ini INFID memiliki Rencana Aksi 15 yaitu perumusan aturan turunan dari UU TPKS (UPTD PPA dan Dana Bantuan Korban). Program ini merupakan komitmen INFID yang dilakukan secara mandiri tanpa dukungan lembaga donor. Mitra program ini, antara lain: Seknas OGP Bappenas, Sekber CSO OGP. Untuk

Rencana Aksi OGP INFID yaitu LPSK, Kemen PPA, dan Kemenkumham.

Kegiatan utama dari program ini di tahun 2023, yaitu: Meaningfull Participation pada OGP Summit di Talinn, Estonia. INFID terlibat dalam mekanisme usulan inisiatif OGP Indonesia untuk OGP award 2023 di Estonia. Dalam prosesnya, INFID mendorong inisiatif renaksi dana bantuan hukum (lainnya yaitu Satudata Kemenkes, dan SPAN LAPOR Kemen PanRB). Inisiatif dana bantuan hukum menjadi salah satu penerima OGP award 2023 di Estonia. Selain itu, INFID juga terlibat dalam penyusunan Bunga Rampai 10 Tahun OGP di Indonesia: Layar dan Jelajah OGP Indonesia (bersama dengan CSO lainnya yang tergabung dalam sekber CSO OGP) dan terlibat dalam penguatan Seknas OGP Bappenas melalui pembentukan inisiatif kerangka regulasi OGP Indonesia melalui Perpres Stranas OGP (masih dalam proses izin prakarsa dan progsun).

2.3 Program Pengurangan Ketimpangan dan Ketidakadilan serta Keanggotaan.

Indonesia secara geografis memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang banyak serta kualitas pelayanan dasar yang masih belum memadai di banyak wilayah, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan yang tidak merata antar wilayah, generasi, sektoral dan hingga ketidakadilan akses bagi kelompok rentan dan marginal. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif lima persen per tahun, tidak lantas mengeluarkan Indonesia dari daftar negara dengan ketimpangan yang tinggi. Kesenjangan terjadi di berbagai sektor dan aspek pembangunan berdampak pada memperlambat proses pengentasan kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Program Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan agar pemerataan pembangunan terwujud di Indonesia. Pertama, INFID harus memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan lima tahun. Kedua, bagaimana membuat sistem pajak dan belanja sosial di Indonesia (tax dan transfer) yang efektif menurunkan ketimpangan. Ketiga, memastikan program-program yang berjalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperluas akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik diskriminasi (terhadap difabel, perempuan, masyarakat adat, lanjut usia hingga kelompok marjinal).

BPS mencatat, terdapat 9,89 juta atau 22,5 persen dari 44,47 juta penduduk berusia 15-24 tahun di Indonesia atau Gen Z menganggur per August 2023. Jelas ini persoalan serius dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga akhir

kepemimpinannya. INFID akan terus berkomitmen dan fokus pada isu-isu krusial dalam penanganan ketimpangan kesempatan kerja melalui perluasan kesempatan peluang kerja dan kerja layak bagi masyarakat sipil. INFID juga akan terus aktif dalam mendorong struktur pajak yang adil sebagai salah satu cara menurunkan ketimpangan. Pajak yang tidak adil akan berdampak pada kehidupan pekerja, terutama rakyat kelas menengah ke bawah, mereka akan membayar pajak lebih banyak (besar) dari orang kaya, begitu pula perempuan membayar pajak lebih tinggi dari laki-laki, sehingga korporasi dapat dengan mudah melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Padahal pajak merupakan sumber penerimaan negara dan sumber kemandirian negara.

Karena itu, untuk mendukung pencapaian tujuan INFID dalam penurunan ketimpangan, menciptakan keadilan dan fasilitasi anggota, maka dilaksanakan beberapa program, baik yang berbasis pembiayaan donor maupun mandiri sebagai bentuk komitmen INFID, sebagai berikut:

1. Sekolah Online Peningkatan Kapasitas Anggota INFID

Program ini dirancang dalam bentuk sekolah online "Pelatihan Penggalangan Dana melalui Penyusunan Proposal bagi Anggota INFID" untuk Memperkuat OMS di Bidang HAM dan Demokrasi dan Demokrasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan capacity building INFID kepada Anggota untuk meningkatkan kompetensinya terutama terkait dengan perihal penyusunan proposal, mengingat dari survei terhadap anggota INFID (2022) ditemukan jumlah anggota yang mengalami kesulitan atau berkurang akses pendanaan organisasinya semakin bertambah menjadi sekitar 73,9% dan banyak anggota berharap mendapatkan dukungan dari Sekretariat INFID terkait dengan peningkatan kapasitas organisasi dalam penyusunan proposal (36,2%).

Program ini didukung oleh KOICA (Korea International Cooperation Agency) dalam kurun waktu July – November 2023, dengan dua kegiatan utama, yaitu: penyusunan modul dan penyelenggaraan sekolah online dalam 7 kali pertemuan. Peserta berasal dari 16 Anggota INFID (tiap lembaga 2-3 orang) yang berasal dari 13 provinsi di 14 kabupaten/kota.

2. HARMONI

Program HARMONI 3 mengambil tema “Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Timur”. Program ini didukung oleh USAID MSI Harmoni, dengan durasi waktu 19 November 2023 hingga 31 July 2024, dengan wilayah kerja di Provinsi Jawa Timur, kabupaten Lamongan dan kabupaten Sidoarjo.

Capaian Harmoni tahun ketiga, yaitu 1. Kertas kebijakan tentang “Urgensi Surat

Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak, 2. Pergub No 81/2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, 3. KepGub Jatim 188/735/KTPS/213/2023 Pokja Optimalisasi PE. Pembelajaran baik dari program ini, antara lain: 1. Mengikat komitmen pemerintah bersama CSO dan ORMAS dalam upaya implementasi RAN PE, 2. Terbentuk Forum Multistakeholder yang mempertemukan unsur OPD, ORMAS dan CSO dalam upaya penanganan dan pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak terpapar radikal terorisme, 3. Membangun komitmen bersama untuk berbagi peran dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, 4. PUG, peluang untuk advokasi indikatornya tentang isu Deportasi dan Returni perempuan dan anak, 5. Penanganan Konflik sosial di ranah pencegahan, penanganan dan pendampingan, 6. Membentuk POKJA sebagai turunan dari TimDu yang melibatkan CSO dan ORMAS, 7. TimDu areanya diperluas dengan menambahkan cakupan deportasi dan returnis, 8. POKJA menyusun Rencana Aksi di setiap aspek bidang (penganggaran), 9. Advokasi mewujudkan RAD turunan dari RAN PE (Perpres No.7 tahun 2021).

3. Penguatan Partisipasi dan Fasilitasi Anggota INFID

Sepanjang tahun 2023, terjadi peningkatan partisipasi anggota INFID dalam beberapa kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi anggota. Sebanyak 52 lembaga dari total 78 lembaga Anggota INFID telah berpartisipasi dalam setidaknya-tidaknya 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat INFID sepanjang tahun 2023 melalui program Pengurangan Ketimpangan, HAM dan Demokrasi, dan SDGs. Keterlibatan Anggota antara lain sebagai narasumber, moderator, peserta, fasilitator, peneliti, penyusun modul, juga terlibat dalam pelaksanaan proyek sebagai mitra kerja sama. Selain itu, ada juga kegiatan yang dirancang khusus untuk anggota, sebagai berikut:

3.1 Inhouse Lecture untuk peningkatan kapasitas Anggota dan Staf Sekretariat.

Program ini bertujuan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas (pengetahuan dan skill) anggota dan staf Sekretariat INFID. Inhouse Lecture didukung oleh Proyek BUILD dari Ford Foundation, dengan 9 kegiatan yang telah diselenggarakan secara hybrid. Tema yang dibahas, meliputi: 1. Masyarakat Sipil: Etika dan Gerakan Sosial; 2. GEDSI: Pendekatan dan Implementasi, 3. Sistem Politik: Pemilu dan Partisipasi, 4. Membangun Laporan Publik/Proyek Lembaga yang Efektif, 5. Isu Terkini Sistem Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Nasional di Indonesia, 6. INFID Dulu dan Kini dalam Perspektif Pelaku Sejarah, 7. True Cost Budget dalam Penyusunan Proposal Budget, 8. Bagaimana Memastikan Pelibatan Bermakna Teman Disabilitas. 9. Bagaimana Memastikan Perlindungan

dan Keselamatan Pekerja NGO dari Segala Bentuk Kekerasan Terutama Kekerasan Seksual. Partisipan Inhouse Lecture pada setiap kegiatan Inhouse Lecture berkisar antara 19 – 49 peserta.

3.2 Donor Meeting dan Peluang Pendanaan Anggota

Program ini dirancang untuk memfasilitasi anggota INFID dalam mencari peluang-peluang pendanaan organisasi sebagai bentuk komitmen sekretariat INFID dalam memfasilitasi anggota. Kegiatan ini terdiri dari sharing informasi peluang pendanaan dan Donor Meeting/ Pertemuan Mitra Pembangunan. Pertama, sharing informasi dilakukan oleh sekretariat INFID melalui mailing list anggota. Sepanjang tahun 2023 setidaknya 48 informasi peluang pendanaan telah disampaikan Sekretariat kepada Anggota INFID. Selain peluang pendanaan, juga disampaikan informasi mengenai peluang untuk mengikuti pelatihan, peluang untuk menjadi konsultan, dan berbagai informasi lainnya. Kedua, donor meeting dilakukan sejak 2019, dimana INFID telah menginisiasi sebuah forum bernama INFID Development Partner Meeting (IDPM). Forum ini merupakan ruang pertemuan yang mempertemukan berbagai lembaga mitra pembangunan untuk semakin mengenali kerja-kerja yang akan dan telah dilakukan oleh INFID dan Anggota INFID. Sepanjang tahun 2023 INFID hanya satu kali melaksanakan kegiatan pertemuan mitra Pembangunan yang mengangkat tema Kondisi dan Tantangan Demokrasi di Indonesia: Penegakan Hukum, Merawat Toleransi & Keberagaman, serta Situasi Ekonomi Sosial Perempuan. INFID mengundang tiga Anggota INFID yaitu Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) yang berkedudukan di DI Yogyakarta, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) yang berkedudukan di DKI Jakarta, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) yang berkedudukan di Sumatera Utara untuk memperkenalkan kerja-kerja yang telah dan akan dilakukan oleh Tiga Anggota INFID tersebut, dan juga untuk mendapatkan masukan dan saran dari lembaga donor yang merupakan mitra utama INFID. Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta, tanggal 16 Maret 2023 pukul 13.30 - 16.00 WIB ini mengundang 26 mitra Pembangunan INFID.

3.3 Survei Anggota INFID 2023

Survei anggota dilaksanakan setiap tahun untuk pembaharuan data-data Anggota INFID dan pemetaan aktivitas serta kebutuhan anggota. Tahun 2023, Sekretariat melakukan survei melalui google form yang dikirimkan kepada 78 lembaga CSO dan 2 individu. Hasil survei ini menjadi bahan atau data bagi sekretariat INFID untuk merumuskan program, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas anggota berbasis kebutuhan dan data yang ada.

4. Konsolidasi dan Penguatan Jaringan Masyarakat Sipil

Selain melaksanakan beberapa program dengan tema spesifik, staf Program Pengurangan Ketimpangan terlibat juga pada beberapa jaringan, antara lain: Koalisi Sipil untuk UU PPRT, Jaringan KUPI II, JMS untuk Keadilan Gender, Jaringan AKSI, Advokasi KBB, Indonesia BERAGAM, KuMPUL, WGWC, Pembela UU TPKS, Women and CVE, OGP, Save All Women and Girls, JP2K.

Keterlibatan INFID dalam beberapa jaringan ini bertujuan untuk memperkuat peran INFID dalam mendukung visi organisasi “Mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan tingkat global”.



BAB 3

INFID DALAM PERSPEKTIF MEDIA

INFID selalu dalam posisi mendukung kebebasan pers di Indonesia, karena kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. Tanpa kebebasan pers, demokrasi dan HAM tidak akan berjalan selaras. Pada 2023 ini, dukungan pemberitaan media massa terhadap INFID sangat besar. Ada 105 jenis media dari berbagai platform yang terdiri dari media massa (mainstream) dan media komunitas (intern) yang dimiliki oleh lembaga, organisasi atau komunitas tertentu. Hampir semua dalam bentuk media online yang mudah di akses dengan perangkat digital (gadget) seperti laptop, tablet dan smartphone. Sebanyak 105 media ini, mayoritas berasal dari media massa (mainstream) berbasis online, sisanya dalam bentuk audio visual (media televisi) atau website dengan platform multimedia.

INFID dan media massa saling bersinergi dalam memberikan informasi yang terpercaya dan kredibel kepada masyarakat. Semisal, pemberitaan media online Detik.com pada 10 December 2023, terkait “Skor Indeks HAM Tahun 2023 Turun Jadi 3,2.” Informasi yang dirilis INFID bersama Setara Institute ini penting bagi audience atau pembaca media. Bahkan media massa juga mendapatkan informasi yang akurat, faktual dan kredibel, berbasis riset ilmiah melalui survei indek Hak Asasi Manusia (HAM). Survei ini penting bagi media dalam merefleksikan kondisi HAM di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini.

Saling sinerginya INFID dengan media massa, media komunitas dan media sosial ini telah memunculkan ruang dialog, sharing knowledge, berbagi gagasan secara bersama dalam kondisi demokratis dan setara bagi masyarakat sipil. INFID telah mengambil langkah strategis berikut;

1. INFID dapat mensosialisasikan berbagai kegiatan (event), melalui program-program yang telah menjadi agenda INFID selama periode waktu 2023, seperti Festival HAM dan lainnya. Sehingga terjadi timbal balik atau feedback; Masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat, sedangkan media massa mendapatkan sumber informasi dan pemberitaan yang kredibel dengan narasumber yang berkualitas.
2. Keragaman isu yang disodorkan INFID memberikan pengetahuan baru bagi para jurnalis dari berbagai media massa dengan beragam medium; online, e-paper, televisi, multimedia, sehingga mereka memahami konteks persoalan yang terjadi di negara ini, baik terkait; Demokrasi dan HAM, hak Ekosob, SDGs, keadilan dan kesetaraan gender, serta isu-isu lainnya yang krusial. Bagi para jurnalis, peliputan kegiatan INFID juga sekaligus memberikan pemahaman dan menambah perspektif baru.
3. INFID dapat melakukan interaksi yang intensif kepada audience terutama anak-anak muda dari Generasi Milenial hingga Generasi Z yang sangat freak gadget dan aktif di hampir semua platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, YouTube. Mereka memiliki perspektif yang berbeda dengan generasi di atasnya. Sehingga mereka perlu diberi ruang dialog, agar gagasan dan aspirasi kaum muda ini tersalurkan dengan baik.
4. Sedangkan bagi media-media komunitas, sinergi ini penting agar informasi yang bersumber dari INFID dapat ikut disebarluaskan ke masyarakat luas yang tidak terjangkau oleh media massa, sehingga jangkauan audience semakin luas dan dapat memberi manfaat ke berbagai lapisan masyarakat.

Feedback dari masyarakat sipil sangat penting untuk mengetahui respon masyarakat sipil atas kampanye-kampanye dan program-program yang disosialisasikan oleh INFID selama periode 2023. Media dalam tiga kategori tersebut yaitu; media massa, media komunitas, serta ditambah media sosial dengan berbagai platform sama pentingnya, karena memiliki segmentasi pembaca (pengguna) yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing, dari berbagai lapisan usia, pendidikan dan gender.



BAB 4

INFID DI TENGAH MASYARAKAT

INFID memiliki peran penting di masyarakat, sebagai NGO yang bergerak di bidang HAM dan Demokrasi, INFID mengambil peran aktif dalam mengadvokasi dan mendampingi organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam kerja-kerjanya. INFID juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat sipil untuk saling bersinergi mewujudkan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Itu menjadi dasar digagasnya Festival HAM setiap tahunnya. Festival HAM bermula dari Konferensi Kabupaten / Kota HAM yang diinisiasi INFID pada 2014, yang tujuannya untuk menciptakan ruang dialog multi pihak yang konsisten melakukan praktik-praktik, baik tata kelola pemerintah daerah yang berbasis HAM, sekaligus meneguhkan komitmen multi pihak untuk mengimplementasikan konsep dan prinsip HAM.

Salah satu kolaborasi yang penting untuk dicatat yaitu terselenggaranya Festival HAM di Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada 2023. Singkawang menjadi tuan rumah kegiatan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan pada 16-19 October. Pelaksanaan Festival HAM 2023, mengangkat tema besar yaitu; Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran dan Inklusif. Tema ini merepresentasikan nilai kolektif yang ada di Singkawang. Terpilihnya Singkawang sebagai tuan rumah festival, karena kota ini pernah dinobatkan sebagai kota yang paling toleran di Indonesia. Singkawang juga dinilai memiliki kebijakan dan regulasi daerah yang beririsan dengan HAM.

Festival HAM bertujuan memberikan apresiasi

terhadap capaian-capaian penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang meliputi Hak Sipil dan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC). Tak dipungkiri, HAM bukan semata masalah kelam pelanggaran, tetapi juga mengapresiasi capaian-capaian pemerintah dan masyarakat sipil dalam penghormatan dan pemenuhan HAM dari aspek ko-eksistensi toleran, serta pergeseran paradigma kinerja pemerintah dari layanan publik (public service) semata menjadi pemenuhan HAM (human right based services).

Sehingga akan mengalami peningkatan, dari good governance menjadi open government dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil. Kinerja dan kolaborasi bersama dalam penguatan HAM ini menjadi penting untuk diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. INFID melibatkan partisipasi publik secara luas tanpa menghilangkan substansi konferensinya, yaitu tetap membahas persoalan dan dinamika HAM di masyarakat. Festival HAM ini pun telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, bahkan komunitas di tingkat nasional dan internasional.

Perwakilan dari berbagai negara yang pernah hadir, berasal dari Eropa, Amerika Latin, Asia hingga badan PBB, selain dari perwakilan kabupaten / kota dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi multi pihak ini sebagai bentuk inisiatif kebangsaan. HAM menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga nasional HAM, kelompok masyarakat sipil dan lainnya. Event tahunan INFID pada Festival HAM 2023, sengaja mengangkat tema “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleransi dan Inklusif”. Karena tema ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini dan merepresentasikan kearifan lokal tuan rumah: Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Selain itu, dalam situasi sulit pasca pandemi— INFID berkomitmen mendampingi lembaga-lembaga mitra (anggota INFID). Bersamaan dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang menghadapi situasi represi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ruang gerak masyarakat sipil menurun yang mengakibatkan kerentanan pada masyarakat sipil, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi— terlihat dari rendahnya mobilitas sosial dan ketimpangan pendapatan yang terus naik. Tidak saja jurang ketimpangan yang menganga lebar, namun juga pertumbuhan ekonomi yang terhambat.

Kondisi memprihatinkan ini berdampak sangat besar terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan yang menurun, pendapatan kerja juga menurun, disertai dengan PHK yang begitu besar di berbagai sektor. Dampak PHK yang terjadi di Indonesia, tentu dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan berpotensi memicu terjadinya kasus-kasus KDRT. Apalagi Indonesia saat ini menghadapi era disrupsi yang terjadi sangat masif, yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang baru, dengan memanfaatkan teknologi digital yang cerdas, seperti Artificial Intelligence (AI), robotik dan lainnya. Banyak profesi dan pekerjaan akan hilang dengan cepat dan berdampak pada serapan tenaga kerja.

Perusahaan-perusahaan memilih pendekatan yang inovatif, efisien dan mengubah lanskap industri. Preferensi konsumen juga berubah cepat didorong oleh teknologi. Perdagangan bebas hingga komunikasi global lebih mudah, mobilitas tenaga kerja semakin luas— dapat bekerja remote atau work from home (WFH), dan dengan persaingan yang luar biasa. Namun gegap gempita itu, dibarengi dengan ketidakpastian ekonomi seperti krisis keuangan global atau perubahan dalam kebijakan pemerintah yang memicu disrupsi di berbagai bidang dan industri.

INFID memahami situasi sulit saat ini— yang juga berdampak pada keberlanjutan organisasi masyarakat sipil kedepannya. Maka INFID menginisiasi pertemuan dengan mitra pembangunan (lembaga donor internasional) dan mempertemukan dengan tiga anggota INFID diantaranya adalah YASANTI, IKA dan BAKUMSU, agar mereka mendapatkan masukan dan saran dari lembaga donor yang merupakan mitra utama INFID akan kerja-kerja yang telah dan akan dilakukan oleh tiga anggota INFID. Sehingga YASANTI misalnya, dapat melakukan kerja-kerja advokasi dan fokus mengawal buruh perempuan dalam isu upah minimum, penawaran murah, minimnya jaminan sosial, diskriminasi patriarki, hingga marginalisasi perempuan yang terpinggirkan dari proses pembangunan.

INFID pernah mengadakan riset pada 2021, penelitian terhadap 157 CSO di Indonesia. Sebanyak 72 persen CSO terdampak di sektor finansial akibat minimnya pendanaan dan alokasi dana yang sebagian besar diarahkan untuk penanganan pandemi. Sebanyak 23 persen CSO berada dalam fase krisis finansial. Untuk itu dibutuhkan pemulihan CSO pasca pandemi untuk menghadapi tahun politik 2024, apalagi sebentar lagi akan diselenggarakan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia. Dengan bantuan INFID, anggota dapat merasakan manfaatnya, seperti IKA yang membutuhkan dukungan pendanaan dalam bentuk birokrasi yang tidak berbelit-belit, salah satu pendanaan dengan dukungan internasional dalam bentuk memberikan micro-fund. Selain itu INFID juga memfasilitasi komunikasi antara CSO Indonesia dengan CSO luar negeri dalam rangka mempromosikan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kaum marginal di Indonesia, serta fokus pada isu-isu yang krusial dan masih terjadi di Indonesia.



BAB 5

CATATAN KRITIS

Sidang Umum Anggota (SUA) INFID 2022 mencatat beberapa mandat penting bagi INFID sebagai NGO yang berbasis keanggotaan. Pertama, INFID harus membangun kekuatan politik yang mampu mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal, nasional dan global. Kedua, INFID menjadi organisasi berbasis anggota yang kuat dan terkonsolidasi. Ketiga, memperkuat program-program berbasis isu-isu strategis dan membangun manajemen pengetahuan yang kuat. Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, maka sekretariat INFID melakukan upaya untuk memfasilitasi anggota dalam banyak program dan kegiatan, guna memastikan INFID berperan dalam mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan tingkat global, sebagaimana visi organisasi.

Pada tingkat nasional, isu tentang pelanggaran HAM, intoleransi beragama, penyempitan ruang sipil sebagai penanda pelemahan demokrasi, kemiskinan dan ketimpangan, ketidakadilan akses terhadap pengelolaan SDA, kesenjangan antar generasi, utang Indonesia yang besar hingga persoalan kualitas pelayanan dasar yang rendah khususnya di Indonesia Timur, menjadi tantangan serius rezim baru mendatang, sehingga perlu memastikan isu-isu tersebut menjadi perhatian para calon presiden, anggota legislatif maupun pemimpin daerah yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024.

INFID secara serius terus mengawal jalan terjal penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia, karena faktanya masih terdapat banyak kasus pelanggaran HAM, tidak terkecuali yang sedang diadvokasi oleh anggota-anggota INFID di berbagai wilayah, mulai dari kasus kekerasan berbasis agama hingga menelan korban jiwa atau komunitasnya terusir— tanpa kejelasan status seperti yang terjadi pada ratusan pengungsi Syiah dari

Sampang, Madura. Para korban kekerasan berbasis agama asal Sampang ini sudah bertahun-tahun ditempatkan di Sidoarjo, tanpa kejelasan nasib sejak 2011 silam. Meski mereka sangat merindukan kampung halaman yang ditinggalkan selama ini. INFID terlibat dan menjembatani dialog, sesuai dengan prinsip HAM, bahwa warga Syiah Sampang juga warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh konstitusi, meski menganut aliran agama yang berbeda. Tidak cuma komunitas Syiah yang mengalami diskriminasi, namun juga Sunda Wiwitan, Ahmadiyah dan lainnya.

Di isu PSDA, Konflik agraria sepanjang 2023 sejumlah 214 kasus (KPA, 2023) yang hampir seluruhnya berujung kekerasan, menggambarkan pendekatan represif negara yang jelas berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM. Banyak anggota INFID yang juga melakukan advokasi di berbagai wilayah menyangkut konflik agraria ini. Di tahun ini, INFID juga terlibat memberikan dukungan kepada Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT), Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang konfliknya meletus pada 2023, dimana tanah ulayat mereka terancam digusur oleh proyek strategis nasional.

Pada isu perempuan dan politik, Indonesia juga masih dihadapkan pada situasi ketidakadilan gender, salah satunya ditunjukkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di Pileg tak sampai 30 persen. Bahkan Bawaslu pada 2023, membuat putusan atas Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 yang menyimpulkan bahwa KPU secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu). Putusan tersebut atas pelaporan dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, termasuk INFID bersama OMS lainnya. KPU terbukti tidak menegakkan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pengajuan daftar calon, seperti yang diatur dalam Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para pelapor termasuk INFID menganggap KPU telah melanggar tata cara penerapan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai calon Anggota DPR, sesuai ketentuan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Hal ini menyusul aturan dalam peraturan KPU (PKPU) No. 10 Tahun 2023 yang mengatur pembulatan ke bawah— jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima, menurut data DPR RI.

Isu korupsi juga menjadi perhatian serius INFID, termasuk upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. ICW merinci ada 15 upaya pelemahan terhadap KPK yakni: Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, proses seleksi pimpinan KPK, ancaman bom ke gedung KPK, Wacana pembubaran KPK dan KPK sebagai lembaga ad hoc, penolakan pengajuan anggaran KPK oleh DPR dan lainnya. INFID memandang bahwa revisi UU KPK bertentangan dengan instrumen hukum dalam UNCAC. KPK telah menjadi alat kekuasaan pemerintah dan penegakan hukum seringkali kurang profesional.

Selain itu, konflik di Papua yang tak berujung juga menjadi perhatian penting INFID di Tahun 2023 ini. Meski sejumlah inisiatif pembangunan dilakukan pemerintah pusat di Jakarta, termasuk penerapan otonomi khusus, pemekaran wilayah, pembangunan infrastruktur dan lainnya. Namun konflik bersenjata terus saja terjadi dan korban-korban yang terbanyak tetaplah masyarakat sipil di berbagai wilayah Papua. INFID memandang konflik Papua harus diselesaikan oleh pemerintah pusat secara dialogis berdasarkan prinsip HAM. INFID juga mendorong Universitas Papua menjadi pelopor SDGs Center di tanah Papua, agar semua pemangku kepentingan dapat duduk bersama, menggabungkan semua sumber daya untuk kemajuan Papua dalam pendidikan, riset, inovasi dan pengabdian masyarakat. Isu-isu strategis di Papua, dapat diprioritaskan dan diselesaikan dengan baik dengan melibatkan banyak pakar dalam berbagai bidang.

Sedangkan pada tingkat global, isu yang menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia, antara lain: krisis iklim/lingkungan, hibah pembiayaan pembangunan dan kerja sama utara selatan, pencapaian target SDGs yang terhambat salah satunya karena Covid-19 serta menciptakan kebijakan yang inklusif untuk keadilan dan kemanusiaan, . INFID melalui jaringan yang dimiliki juga turut aktif menyuarakan isu-isu tersebut. INFID misalnya menjadi focal point dan menyusun laporan Global Partnership for Economic Development Cooperation (GPEDC) dari cluster masyarakat sipil pada November 2023. Penunjukan focal point ini diberikan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari GPEDC global. GPEDC adalah inisiatif internasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan utara selatan sejak 2011. GPEDC berfungsi sebagai platform bersama bagi pemerintah, organisasi internasional, filantropi, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lain untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan memfasilitasi kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam laporan tersebut, INFID mengevaluasi efektivitas bantuan pembangunan dari perspektif organisasi masyarakat sipil. Laporan ini saat ini dianalisis oleh UNDP global untuk menjadi bagian dari laporan GPEDC Indonesia

INFID sebagai OMS yang terdiri dari 78 anggota dan 2 orang perwakilan individu merupakan organisasi besar yang perannya sangat strategis untuk melakukan perubahan penting di tingkat lokal, nasional dan global. Cerita di atas menggambarkan tantangan NGO yang masih banyak untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan, artinya INFID harus mampu menjadi organisasi yang kuat, terkonsolidasi dan memiliki kapasitas untuk terus produktif, inovatif dan konstruktif dalam membangun ide dan gagasan, berkomitmen dalam penegakan HAM dan demokrasi, serta aktif melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ini penting dilakukan, mengingat tahun depan, Indonesia akan memasuki tahun Pemilu yang penuh dengan tantangan dan harus terus dikawal untuk Indonesia yang lebih baik.

KEGIATAN PROGRAM HAM DAN DEMOKRASI

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
1	International Workshop, "Strengthening Solidarity and Consolidating the Islamic Movement as Rahmatan Lil Alamiin in Muslim Countries" - PREVENT	23 Januari 2023
2	Lokakarya MEL PREVENT 28-29 Januari 2023	28 Januari 2023
3	Diskusi "Konsolidasi dan Penguatan Peran CSO untuk Pemajuan HAM di Indonesia"	30 Januari 2023
4	SEMILOKA ASEAN 2023 "ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pentingnya Peran Masyarakat Sipil bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023"	14 Maret 2023
5	FGD Bisnis yang Inklusif dan Bertanggungjawab di Indonesia dalam konteks ASEAN 2023	31 Maret 2023
6	Online Media Campaign	01 April 2023
7	Pelatihan Pengarusutamaan GEDSI dalam Program INKLUSI	05 April 2023
8	Webinar BHR: Urgensi Penanganan Sampah Laut	30 May 2023
9	Diseminasi Riset Moderasi Beragama - INKLUSI	14 June 2023
10	Pelatihan Keamanan Digital - Konsorsium INKLUSI	15 June 2023
11	Training of Facilitator "Fasilitator Keberagaman"	01 July 2023
12	Pertemuan Nasional BHAM & Closing Graisea2	06 July 2023
13	Penandatanganan MOU Festival HAM 2023	13 July 2023
14	Kelas Menulis dengan Pendekatan Toleransi dan Perdamaian	20 July 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
15	Diskusi Terfokus Rancangan Peraturan Presiden "Kerukunan Umat Beragama" (INKLUSI)	25 July 2023
16	Pelatihan Advokasi dan Kebijakan Moderasi Beragama di Sekolah	27 July 2023
17	Sekolah Demokrasi Online Jawa Timur-PW Fatayat NU Jawa Timur	01 Augst 2023
18	Workshop Perumusan Rancangan Peraturan Presiden "Kerukunan Umat Beragama" (INKLUSI)	07 Augst 2023
19	Konferensi Pers "Laporan Usulan Pasal pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama" (INKLUSI)	12 Augst 2023
20	Side Event ASEAN Inclusive Business Summit 2023	21 Augst 2023
21	Diskusi Economic Justice Convergence Space APF 2023	02 September 2023
22	Penandatanganan PKS Festival HAM 2023	06 September 2023
23	Pelatihan Offline Kab/Kota HAM 2023 Singkawang - INKLUSI	19 September 2023
24	Youth Camp "Muda Toleran"	27 September 2023
25	Indonesian Human Rights Cities Session at The 13th World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2023	06 October 2023
26	Workshop Youth Fellowship	09 October 2023
27	Diskusi Paralel INFID Festival HAM 2023	
28	"Suara dan Aksi Orang Muda untuk Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan" (PREVENT)	18 October 2023
30	Dialog Advokasi Masyarakat Sipil Pasca Perpres Stranas Bisnis dan HAM	31 October 2023
31	Temu Jejaring Sektor Privat untuk Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence)	28 November 2023
32	Pelatihan Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence)	29 November 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
33	Pelatihan Daring Kabupaten/Kota HAM	01 December 2023
34	Pelatihan untuk Memperkuat Kepemimpinan Perempuan di Negara Mayoritas Islam “Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi yang Berkeadilan”, Kolaborasi dengan Komnas Perempuan	04 December 2023
35	Diseminasi Riset “Capaian dan Keberlanjutan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020 – 2024 (RAN PE)”	05 December 2023
36	Launching Indeks HAM 2023	10 December 2023
37	Sekolah Demokrasi Online Banten-P3M	13 December 2023

KEGIATAN PROGRAM SDGS

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
1	Courtesy Meeting “Potensi Dukungan Percepatan Perpres Dana Abadi LSM”	11 Januari 2023
2	Rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan WVI Papua Barat	24 Januari 2023
3	Pertemuan stakeholder kunci pokja pendidikan	25 Januari 2023
4	Pertemuan stakeholder pokja pendidikan dengan CSO & Gereja	25 Januari 2023
6	Courtesy meeting Pokja Pendidikan	25 Januari 2023
5	Courtesy meeting dengan Bappeda	26 Januari 2023
7	Inhouse Lecture #1	31 Januari 2023
8	Dialog Multipihak - Pembentukan Kelompok Kerja Multipihak bidang Kesehatan di Provinsi Papua	31 Januari 2023
9	Review dan Koordinasi Riset Wawasan Kebangsaan Ormas with Kemendagri	10 Februari 2023
10	Organizational Mapping Tool Day 1	11 Februari 2023
11	Organizational Mapping Tool Day 2	12 Februari 2023
12	Government Self Assessment Report Renaksi 2020-2022 dan RPermen RAN OGI	16 Februari 2023
13	Government Self Assessment Report Renaksi 2020-2022 dan RPermen RAN OGI	17 Februari 2023
14	Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs 16 serta program kerja yang mendukung di Makassar	21 Februari 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
14	Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs 16 serta program kerja yang mendukung di Makassar	21 Februari 2023
15	Indepth Interview Earned Income	22 Februari 2023
16	Dialog Multipihak Pendidikan “Akses dan Alokasi Dana Otsus pada Sektor Pendidikan bagi Peserta Didik OAP”	22 Februari 2023
17	Inhouse Lecture #2	27 Februari 2023
18	Peer Review Riset Blended Finance	15 Februari 2023
19	Konsultasi Publik Terbatas: Instrumen dan Framework Studi Organisasi Masyarakat Mengenai Ketahanan Dan Wawasan Kebangsaan Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian TPB	19 Maret 2023
20	FDG SOP Komunikasi Part 1	19 Maret 2023
21	Konsultasi Publik Terbatas: Instrumen dan Framework Studi Organisasi Masyarakat Mengenai Ketahanan Dan Wawasan Kebangsaan Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian TPB - Day 2	20 Maret 2023
22	Dialog Multipihak Pokja Kesehatan: Proses Perumusan Program dan Penganggaran Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua	21 Maret 2023
23	Dialog Multipihak Pendidikan: Inisiasi Kelompok Kerja Multipihak Pendidikan Papua Barat	21 Maret 2023
23	Inhouse Lecture #3	27 Maret 2023
24	Pelatihan Membaca Nyaring	27 Maret 2023
25	IWD	30 Maret 2023
26	Pemetaan Pokja MSF Kesehatan	30 Maret 2023
27	Pertemuan Pokja MSF Kesehatan	11 April 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
28	Peran dan tanggung Jawab Insan Pers dalam mendorong pemberitaan terkait dengan pencapaian target SDGs Tujuan 16 di Kota Makassar	12 April 2023
29	Dialog terbatas dan Kick off meeting Pokja DA OMS	17 April 2023
30	FGD Penggalan Data Blended Finance	17 April 2023
31	Penyusunan RAD SDGs Kota Kupang	03 May 2023
32	Penyusunan RAD SDGs Kota Kupang	04 May 2023
33	FGD II Blended Finance	10 May 2023
34	Diskusi Stakeholder dan Konsultasi Publik	10 May 2023
35	Pertemuan Pokja MSF Pendidikan	15 May 2023
36	Diskusi Klaster CSO, Filantropi, Akademisi, dan Media (IDFoS)	16 May 2023
37	Diskusi Klaster Pengambil Kebijakan Pencapaian SDGs dengan Aksi bersama di Kab. Bojonegoro (IDFoS)	17 May 2023
38	OG Week "Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS: Mendorong DBK dan UPTD PPA"	21 May 2023
39	Konsultasi Publik Implementasi SDGs di Aceh: Penyusunan dokumen laporan capaian & tantangan CSO dan Gerakan Perempuan di Aceh terkait percepatan pencapaian sektoral Tujuan 16 SDG	23 May 2023
40	Otsus Goes to Campus UNIPA	25 May 2023
42	Courtesy Meeting dg Advisor dan Peneliti Tata Kelola dan Kelembagaan	25 May 2023
43	FDG SOP Komunikasi Part 2	26 May 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
44	Diskusi Kelompok Terarah: Studi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian TPB	30 May 2023
45	Inhouse Lecture #4 "Membangun Laporan Publik/Proyek Lembaga yang Efektif"	31 May 2023
46	Diskusi Klaster Sektor Swasta	31 May 2023
47	Audiensi dengan Deputi Bappenas	09 June 2023
48	Konsultasi Tindak Lanjut OMT	09 June 2023
50	Pertemuan Pokja MSF Kesehatan	12 June 2023
51	Workshop Fotografi	13 June 2023
52	Inhouse Lecture #5	20 June 2023
53	Dialog Multipihak - Hotel royal kuningan	21 June 2023
54	Pertemuan Pokja MSF Pendidikan	22 June 2023
55	Capacity Building Anggota Pokja MSF Kesehatan Papua dan MSF Pendidikan Papua Barat	27 June 2023
56	Capacity Building Anggota Pokja MSF Kesehatan Papua dan MSF Pendidikan Papua Barat	28 June 2023
57	Courtesy Meeting dengan Advisor dan Peneliti Tata Kelola dan Kelembagaan	06 July 2023
49	Peer Review Blended Finance	10 July 2023
58	Pertemuan Pokja MSF Pendidikan	12 July 2023
59	Dialog Multipihak: Mendorong Pencapaian Papua Cerdas yang Berkelanjutan	14 July 2023
60	Pertemuan Tim PokJa MSF Kesehatan dengan INFID	17 July 2023
61	Inhouse Lecture #6 "INFID Dulu dan Kini dalam Perspektif Pelaku Sejarah: Ibu Zumrotin KS"	18 July 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
62	Take Video Narasi	24 July 2023
64	Diseminasi Publik hasil studi "Analisis Kebutuhan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Papua dan Papua Barat Tahun 2023"	26 July 2023
63	Peer Review Dokumen Tata Kelola dan Kelembagaan	27 July 2023
65	Penguatan Kapasitas SDM Aparatur OPD Penggerak PUGPPRG Day 1	02 Augst 2023
66	Penguatan Kapasitas SDM Aparatur OPD Penggerak PUGPPRG Day 2	03 Augst 2023
67	Penguatan Kapasitas SDM Aparatur OPD Penggerak PUGPPRG Day 3	04 Augst 2023
68	INFID Inhouse Lecture Series #7	04 Augst 2023
69	Launching Policy Paper Blended Finance	14 Augst 2023
70	Peer Review Riset Wasbang	15 Augst 2023
71	FGD Penyusunan PB MSF Kesehatan Day 1	15 Augst 2023
72	FGD Penyusunan PB MSF Kesehatan Day 2	16 Augst 2023
73	Training CSO - Hari 1	21 Augst 2023
74	Pertemuan Pokja MSF Pendidikan	21 Augst 2023
75	Training CSO - Hari 2	22 Augst 2023
76	Pertemuan Pokja MSF Kesehatan	29 Augst 2023
77	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja DA OMS	31 Augst 2023
78	Jakarta Forum on G20 and ASEAN	04 September 2023
79	Konferensi Pers Masyarakat Sipil Menyikapi ASEAN Summit ke-43	06 September 2023
80	Koordinasi OGI INFID x IJRS	20 September 2023
81	Diskusi Publik Video Narasi	21 September 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
82	Audiensi dengan PGI	25 September 2023
83	Rapat Kerja dalam rangka Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan	27 September 2023
84	Tindak Lanjut Peran Civil Society Organization (CSOs) dalam Monitoring Implementasi Kerja Sama Pembangunan yang Efektif melalui kerangka Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)	29 September 2023
85	Peer Review Dokumen Bisnis Proses (I)	02 October 2023
86	Koordinasi REMDEC INFID	04 October 2023
87	Koordinasi Riset 3 DOB	06 October 2023
88	Audiensi dengan Ketum PKB	10 October 2023
89	Audiensi dengan Setwapres	11 October 2023
90	Audiensi dengan Kemenkeu	17 October 2023
91	Audiensi dengan Bappenas	17 October 2023
92	Sosialisasi GPEDC CSO	18 October 2023
93	Pertemuan Dewan Pengarah OGI untuk Penguatan Dasar Hukum dan Implementasi OGI	23 October 2023
94	Diskusi Kampanye 16HAKTP	23 October 2023
95	Rapat koordinasi tim comms Pokja DA OMS	31 October 2023
96	Diskusi dan Koordinasi Riset: Studi Wawasan Kebangsaan Ormas dalam Pelaksanaan dan Pencapaian TPB	06 November 2023
97	Audiensi dengan Menko Polhukam	07 November 2023
98	Peer Review 2 Dokumen Bisnis Proses DA OMS	09 November 2023
99	Dialog Terbatas BLU	17 November 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
100	Rapat Koordinasi Pokja DA OMS	30 November 2023
101	Audiensi dengan PP Muhammadiyah	04 December 2023
102	Dialog Publik Studi Wawasan Kebangsaan Ormas dalam Pelaksanaan dan Pencapaian TPB	05 December 2023
103	Merayakan 16 HAKTP: Implementasi dan Advokasi UU TPKS, serta mendorong Partisipasi Publik	09 December 2023
104	Workshop Peningkatan Kapasitas OMS Day 1	12 December 2023
105	Workshop Peningkatan Kapasitas OMS Day 2	13 December 2023
106	Wawancara monev - Bappenas	20 December 2023
107	Wawancara monev - Pokja (Zumrotin dan Anick)	21 December 2023

KEGIATAN PROGRAM PENGURANGAN KETIMPANGAN

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
1	Penyusunan Modul Sekolah Online "Pelatihan Penggalangan Dana melalui Penyusunan Proposal bagi Anggota INFID"	01 July 2023
2	External Peer Review pada Draf 1 Modul Sekolah Online	15 Augst 2023
3	Pertemuan Pendahuluan Sekolah Online "Pelatihan Penggalangan Dana melalui Penyusunan Proposal bagi Anggota INFID"	25 September 2023
4	Inhouse Lecture #8 "Bagaimana Memastikan Pelibatan Bermakna Teman Disabilitas"	27 September 2023
5	Pertemuan Pertama Sekolah Online "Membuat Rumusan Masalah (Problem Statement)"	05 October 2023
6	Pertemuan Kedua Sekolah Online "Merumuskan Teori Perubahan (Theory of Change - ToC)"	12 October 2023
7	Pertemuan Ketiga Sekolah Online "Mengembangkan Kerangka Logis (Logical Framework)"	26 October 2023
8	Pertemuan Keempat Sekolah Online "Penganggaran (Budgeting)"	02 November 2023
9	Pertemuan Kelima Sekolah Online "Monitoring, Evaluation and Learning (MEAL)"	09 November 2023
10	Pertemuan Keenam Sekolah Online "Membangun Brand Organisasi dan Lobby"	16 November 2023
11	Inhouse Lecture #9 "Bagaimana Memastikan Perlindungan dan Keselamatan Pekerja NGO dari Segala Bentuk Kekerasan Terutama Kekerasan Seksual"	28 November 2023

PUBLIKASI PROGRAM HAM DAN DEMOKRASI

NO	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
1	Laporan Akhir Praktik Moderasi Beragama di Lembaga Publik: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), SMAN 53 Jakarta, dan MAN Insan Cendekia Sumatra Barat	Mohammad Iqbal Ahnaf Agus Muhammad Anis Fuadah
2	Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan: Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (RAN PE)	AB Widyanta Abdul Hanif Abdul Waidl Dina Mariana Dinda Ahlul Latifah Rajif Dri Angga Sanita Rini Sukasmanto
3	Buku Panduan Advokasi Program dan Kebijakan Moderasi Beragama di Sekolah	A. Sholeh Dimyathi Agus Setiawan Ahmad Budiman Abd Aziz Rofiq Budi Mulia Daruri Diden Rosenda Endang Zaenal Iim Halimah Mahnan Marbawi Susan Daniati

NO	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
4	Policy Paper: Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak	Tim Penyusun Siti Mazdafiah Ida Rochmawati Dewi Winarti Tim Fatayat NU Jawa Timur Wiwik Endahwati Kamilah Tim INFID AD. Eridani Sanita Rini
5	Policy Paper: Urgensi Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal Terorisme Termasuk Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak	Tim Penyusun Sri Mulyati Neng Hannah Tim INFID AD. Eridani Sanita Rini

PUBLIKASI PROGRAM SDGS

NO	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
1	Kertas Kebijakan: Penerapan Blended Finance dalam Proyek Pembangunan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 menuju Visi Indonesia 2045: Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Angelika Fortuna Dewi Rusdy Badiul Hadi Bona Tua Parlinggomon Parhusip Marlis Afridah
2	Studi Wawasan Kebangsaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Dr. Andreas Budi Widyanta Ari Wibowo, MSc Gregorius Ragil Wibawanto, MAPS Hartmantyo Pradigto Utomo, MA Odam Asdi Artosa, MA Dian Puspita, MA Bona Tua Parlinggomon Parhusip Rinto Leonardo S
3	Kerangka Konseptual dan Operasional Tata Kelola dan Kelembagaan Dana Abadi OMS	Ilham B. Saenong Ibrahim Fahmy Badoh Sugeng Bahagijo Bona Tua Parlinggomon Parhusip Desri Astuti

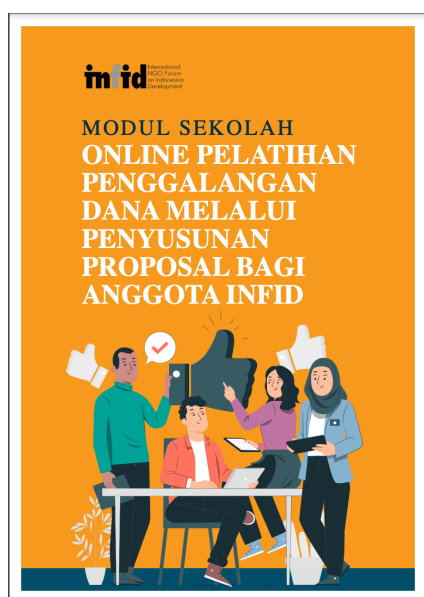
NO	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
4	Analisis Kebutuhan Peningkatan Layanan Publik Pendidikan Dan Kesehatan Di Papua Dan Papua Barat Tahun 2023	Richard Patty Victor Mahulette Victor Rumere
5	Rapid Assessment Studi Kebutuhan Utama Daerah Otonomi Baru di Papua pada Isu Prioritas Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan dalam Kerangka Otonomi Khusus (supply side) Papua Barat Daya dan Papua Selatan	Prof. Dr. Bambang Hidayana, MA. Dyah Chandra, MA Dr. AB Widyanta, MA. Suharto, S.Sos
6	Kajian Identifikasi Sektor dan Komoditas Unggulan Daerah Di Papua Barat Daya	Jemmy Manan Yubelina Y.H Mamoribo Johannes P. Kiromath
7	Dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 s.d 2028	Dr. Hendri, S.Si., M. Si Dr. Amestina Matualage, SP., M. Sc Dr. Albertus Girik Allo, SP., M. Si
8	Proses Bisnis Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil	Ah Maftuchan Victoria Fanggidae Eka Afrina Muharrirroh Bona Tua Parlinggomon Desri Astuti

PUBLIKASI PROGRAM PENURUNAN KETIMPANGAN

NO	JUDUL PUBLIKASI	PENULIS
1	Modul Pelatihan Penggalangan Dana Melalui Penyusunan Proposal Bagi Anggota Infid	Listyowati dan Ardianto

LINK PUBLIKASI INFID

publikasi dan produk komunikasi terpilih yang disusun sepanjang tahun program 2023. Di antaranya berupa riset, modul, dan laporan terkait.



This report is originally issued in Indonesian language.

No. : 00396/2.1315/AU.2/11/1629-1/1/XI/2024

Laporan Auditor Independen

Dewan Pengawas, Badan Pengurus dan
Sekretariat
International NGO Forum on Indonesian Development

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development ("Perkumpulan INFID") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan INFID tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perkumpulan INFID berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Board of Supervisory, Board of Management and
Secretariat
International NGO Forum on Indonesian Development

Opinion

We have audited the financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development ("INFID Association"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of activities, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the INFID Association as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the INFID Association in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal-hal Lain

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perkumpulan INFID tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian-penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali dan mereklasifikasi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian-penyesuaian tersebut sudah wajar dan telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian-penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan keuangan Perkumpulan INFID tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 5 Juni 2023.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perkumpulan INFID dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perkumpulan INFID atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perkumpulan INFID.

Other Matters

As part of our audit of the INFID Association's financial statements as at December 31, 2023 and for the year then ended, we also audited the adjustments described in Note 4 to the accompanying financial statements that were applied to restate and reclassify the financial statements as at December 31, 2022 and for the year then ended. In our opinion, such adjustments are fair and have been properly applied. We were not engaged to audit, review, or apply any procedures to the financial statements as at December 31, 2022 and for the year then ended other than with respect to the adjustments and, accordingly, we do not express an opinion or any other form of assurance on the financial statements as at December 31, 2022 and for the year then ended taken as a whole. Our opinion is not modified in respect of this matter.

The financial statements of the INFID Association as at December 31, 2022 and for the year then ended, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those financial statements on June 5, 2023.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the INFID Association's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the INFID Association or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the INFID Association's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perkumpulan INFID.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perkumpulan INFID untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perkumpulan INFID tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the INFID Association's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the INFID Association's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the INFID Association to cease to continue as a going concern.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Suharli, Sugiharto & Rekan



Ridho Fathoni, CPA
Registrasi Akuntan Publik/*Public Accountant Registration No. AP. 1629*

7 November 2024/*November 7, 2024*



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDOONESIAN
DEVELOPMENT**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDOONESIAN
DEVELOPMENT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1 Nama	:	Jim Toar Matuli	:	Name 1
Alamat kantor	:	Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu Jakarta Selatan	:	Office address
Alamat domisili sesuai KTP	:	Teras Candraloka Blok B 2/8 T. KahuripanKemang Bogor	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor telepon	:	0813-1913-1375	:	Phone Number
Jabatan	:	Pjs. Direktur Eksekutif/Acting Excecutive Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|--|
| 1 Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development; | 1 We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development; |
| 2 Laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; | 2 The financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development have been prepared and presented in accordance with Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities; |
| 3 a Semua informasi dalam laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3 a All information has been fully and correctly disclosed in the International NGO Forum on Indonesian Development financial statements; |
| b Laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b The financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development do not contain any improper material information or fact, nor do not omit material information or fact; |
| 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal International NGO Forum on Indonesian Development. | 4 We are responsible for the internal control system of International NGO Forum on Indonesian Development. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 7 November/ November 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/
For and on behalf of the Board of Directors



Jim Toar Matuli

Pjs Direktur Executive / Acting Executive Director

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022 Disajikan Kembali/ As Restated (Catatan/Note 4)	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	18.884.591.832	5	14.143.204.315	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain - pihak ketiga	606.838.738	6	1.024.278.961	Other receivables - third parties
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.717.016.099	7	1.262.953.700	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	21.208.446.669		16.430.436.976	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-current Assets
Aset tetap - neto	8.864.239.767	8	8.970.891.347	Fixed assets - net
JUMLAH ASET	30.072.686.436		25.401.328.323	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang lain-lain	591.431.304	9	967.302.487	Other payables
Utang pajak	112.067.244	10a	261.317.727	Tax payable
Beban yang masih harus dibayar	634.682.841	11	2.089.869.894	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pascakerja	35.242.186	12	16.766.321	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.373.423.575		3.335.256.429	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-current Liabilities
Pendapatan diterima di muka	22.547.434.568	13	18.322.643.967	Unearned revenues
JUMLAH LIABILITAS	23.920.858.143		21.657.900.396	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	-		-	With restrictions from resources provider
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	6.151.828.293		3.743.427.927	Without restrictions from resources provider
JUMLAH ASET NETO	6.151.828.293		3.743.427.927	TOTAL NET ASSETS
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	30.072.686.436		25.401.328.323	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIA DEVELOPMENT
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIA DEVELOPMENT
STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023			Catatan/ Notes	2022 Disajikan Kembali/As Restated (Catatan/Note 4)			
	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya/With restrictions from resources provider	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya/Without restrictions from resources provider	Jumlah/Total		Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya/With restrictions from resources provider	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya/Without restrictions from resources provider	Jumlah/Total	
PENDAPATAN								REVENUES
Sumbangan dari pemberi sumber daya	26.135.392.123	-	26.135.392.123	14	17.882.293.210	-	17.882.293.210	Donations from resources provider
Sumbangan dari nonpemberi sumber daya	-	4.832.326.671	4.832.326.671	14	-	2.686.396.759	2.686.396.759	Donations from non-resources provider
JUMLAH PENDAPATAN	26.135.392.123	4.832.326.671	30.967.718.794		17.882.293.210	2.686.396.759	20.568.689.969	TOTAL REVENUES
BEBAN								EXPENDITURES
Biaya personel	(16.456.606.332)	(18.555.868)	(16.475.162.200)	15	(11.231.730.957)	-	(11.231.730.957)	Personnel cost
Institusional	(4.567.850.361)	(1.359.530.642)	(5.927.381.003)	15	(3.363.146.976)	(1.071.849.512)	(4.434.996.488)	Institutional
Penelitian dan publikasi	(3.986.176.397)	(236.648.295)	(4.222.824.692)	15	(1.912.732.099)	(90.769.099)	(2.003.501.198)	Research and publication
Administrasi dan umum	(767.831.763)	(474.977.832)	(1.242.809.595)	15	(744.600.544)	(610.944.005)	(1.355.544.549)	General and administration
Perencanaan, pemantauan dan evaluasi	(176.550.115)	(327.347.987)	(503.898.102)	15	(280.803.500)	(111.129.700)	(391.933.200)	Planning, monitoring and evaluation
Pengadaan dan pemeliharaan	(170.377.155)	(2.649.600)	(173.026.755)	15	(299.279.134)	(4.800.000)	(304.079.134)	Aquisition and maintenance
Tindakan advokasi dan politik	(10.000.000)	(148.270.000)	(158.270.000)	15	(50.000.000)	(233.802.500)	(283.802.500)	Advocacy and political action
Penyusutan	-	(164.843.556)	(164.843.556)	15	-	(135.123.723)	(135.123.723)	Depreciation
JUMLAH BEBAN	(26.135.392.123)	(2.732.823.780)	(28.868.215.903)		(17.882.293.210)	(2.258.418.539)	(20.140.711.749)	TOTAL EXPENDITURES

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT
STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023			Catatan/ Notes	2022 Disajikan Kembali/As Restated (Catatan/Note 4)			
	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya/ <i>With restrictions from resources provider</i>	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya/ <i>Without restrictions from resources provider</i>	Jumlah/Total		Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya/ <i>With restrictions from resources provider</i>	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya/ <i>Without restrictions from resources provider</i>	Jumlah/Total	
SURPLUS	-	2.099.502.891	2.099.502.891		-	427.978.220	427.978.220	SURPLUS
Penghasilan keuangan	-	308.897.475	308.897.475		-	202.821.389	202.821.389	Financial income
JUMLAH SURPLUS TAHUN BERJALAN	-	2.408.400.366	2.408.400.366		-	630.799.609	630.799.609	TOTAL SURPLUS FOR THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Notes to the Financial Statements are an
integral part of the Financial Statements taken as a whole.

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIA DEVELOPMENT LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIA DEVELOPMENT STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	2023	2022 Disajikan Kembali/ As Restated (Catatan/Note 4)	
PERUBAHAN ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN			CHANGES OF NET ASSETS WITH RESTRICTION
Saldo aset neto dengan pembatasan pada awal tahun - (sebelum disajikan kembali)	-	9.346.529.274	Net assets balance with restrictions at beginning of the year - (before restatement)
Dampak penyajian kembali laporan keuangan (Catatan 4)	-	(9.346.529.274)	Impact of restatement of financial statements (Note 4)
Saldo aset neto dengan pembatasan pada akhir tahun	-	-	Net assets balance with restrictions at end of the year
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATAHAN			CHANGES OF NET ASSETS WITH RESTRICTION
Saldo aset neto tanpa pembatasan pada awal tahun	3.743.427.927	3.112.628.318	Net assets balance without restrictions at beginning of year
Kenaikan aset neto tanpa pembatasan tahun berjalan	2.408.400.366	630.799.609	Increase in net assets without current year restrictions
Saldo aset neto tanpa pembatasan pada akhir tahun	6.151.828.293	3.743.427.927	Net assets balance with restrictions at end of the year
JUMLAH ASET NETO	6.151.828.293	3.743.427.927	TOTAL NET ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Notes to the Financial Statements are an integral part of the Financial Statements taken as a whole.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@indfid.org www.indfid.org

Follow Us :